

**ANALISIS RENCANA STRATEGI DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN PIDIE PADA SEKTOR PERTANIAN 2017-2020**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

IKHWANUR RIJAL

NIM. 170801047

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu politik



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH

T.A 2022

LEMBARAN PENGESAHAN

**"ANALISIS RENCANA STRATEGI DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN PIDIE PADA SEKTOR PERTANIAN 2017-2020"**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Ranry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan**

Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

IKHWANUR RIJAL

NIM. 170801047

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Muhammad Thalal, Lc., MA

NIP.197810162008011011

Pembimbing II



Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc.

NIDN.200701903

**ANALISIS RENCANA STRATEGI DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN PIDIE PADA SEKTOR PERTANIAN 2017-2020**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Jumat 22 Juli 2020 M
22 Zulhijjah 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

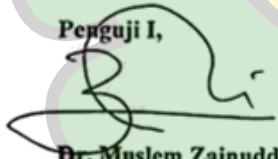
Ketua


Muhammad Thalal, Lc., M.S., M.Ed
NIP.197810162008011011

Sekretaris


Renaldi Safriansyah, SE., MHSc., M.PM
NIDN.2007017903

Penguji I,


Dr. Muslem Zainuddin, M. Si
NIP.196610231994021001

Penguji II,


Siti Nur Zalikha, M. Si.
NIP.1999002282018032001

AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewa, S.Ag., M.Hum.
NIP.19730723200032002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikhwanur Rijal
Nim : 170801047
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Analisis Rencana Strategi Dan Pembangunan
Kabupaten Pidie Pada Sektor Pertanian 2017-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan ini;

1. Menyatakan bahwa tulisan skripsi ini asli milik saya tanpa melakukan *copy-paste* dari milik orang lain, melainkan hanya mengambil kutipan dan kemudian parafrase.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.
3. Mampu mempertanggungjawabkan hasil karya ini.
4. Mengerjakan sendiri karya ini tanpa mengubah data sedikitpun berdasarkan hasil temuan pada saat melakukan penelitian.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak luar atas karya saya ini, dan ditemukan plagiasi yang telah melalui pembuktian yang sah. Maka saya sangat siap untuk di periksa dan siap juga menerima sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 11 Januari 2022



/Ikhwanur Rijal

ABSTRAK

Rencana strategis pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pidie periode 2017-2020 mengalami berbagai tantangan. Hal ini diperkuat dengan beberapa keterangan dari masyarakat yang mengaku belum mendapatkan dampak langsung dari kebijakan PemKab Pidie dalam hal sektor pertanian. Dengan total luas lahan 26.826 ha lahan basah dan 1.101,46 ha lahan kering yang tersebar di 23 Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari kebijakan program PemKab Pidie dalam mencapai peningkatan produksi, menurunkan inflasi, meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan teori pembangunan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pidie 2017-2020 mengalami penurunan produktivitas padi, jumlah produksi dari 285 Ribu Ton pada tahun 2017 menurun pada tahun 2020 dengan jumlah produksi sebesar 269 Ribu Ton, dengan begitu terjadi penurunan sebesar 16 Ribu Ton produksi periode 2017-2020. Kemudian, Kabupaten Pidie tidak tergolong kedalam daerah inflasi, hal ini disampaikan oleh pegawai di BPS Provinsi Aceh. Selanjutnya pendapatan petani menurun jika dilihat dari NTP, pada tahun 2017 NTP sebesar 108,27 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar NTP=106, menurun sebesar 2,27 poin. Dengan terjadinya penurunan produktivitas padi, akan tetapi tingkat ketersediaan pangan dalam hal ini konsumsi beras masih terjaga yakni sebesar 7000 Ton beras pada tahun 2017 dan 6000 Ton pada tahun 2020. Untuk menjaga pangan tetap tersedia, stabilitas harga gabah di Kabupaten Pidie masih berkisar Rp4600-Rp5000/kg, dan di samping itu harga beras berkisar Rp15000-Rp19000/kg sepanjang tahun 2017-2020.

AR - RANIRY

Keywords: Pembangunan, Rencana Strategis, Sektor Pertanian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“ANALISIS RENCANA STRATEGI DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PIDIE PADA SEKTOR PERTANIAN 2017-2020”** ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Skripsi. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan memerlukan banyak perbaikan. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, dengan tulus ikhlas saya menyampaikan terima kasih kepada Ibuk/bapak selaku dosen pembimbing dalam pembuatan proposal skripsi ini, serta teman-teman yang telah memberikan bantuan dan partisipasinya baik dalam bentuk moril maupun materiil untuk keberhasilan dalam penyusunan proposal skripsi ini. saya selaku penyusun berharap semoga makalah ini ada guna dan manfaatnya terutama bagi peneliti sendiri dan juga untuk para pembaca.

Pada Kesempatan ini, saya ingin berterima kasih kepada :

1. Terima kasih kepada Allah SWT dan Baginda Nabi Muhammad SAW.
2. Ibu dan Abu tercinta yang telah mendidik dan memberikan suntikan dana selama berada di perantauan.
3. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Uin Ar-Raniry

4. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya
5. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik.
RizkikaLhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Dr. H. AbdullahSani, Lc, M.A,selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
6. Terima Kasih kepada Bapak Muhammad Thalal, Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc.s selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan dalam penulisan ini. Sehingga peenulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak sempurna.
7. Terimakasih kepada Bapak Fahdlullah TM Daud (Wakil Bupati Pidie) yang telah melauangkan waktu dan tempat untuk di wawancarai, sehingga teknik pengumpulan data dapat terlaksakan dengan baik.
8. Terima kasih juga kepada Bapak Hasballah, SP.MM selaku Plt kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam penulisan ini.

Ikhwanur Rijal
Penulis

DAFTAR ISI

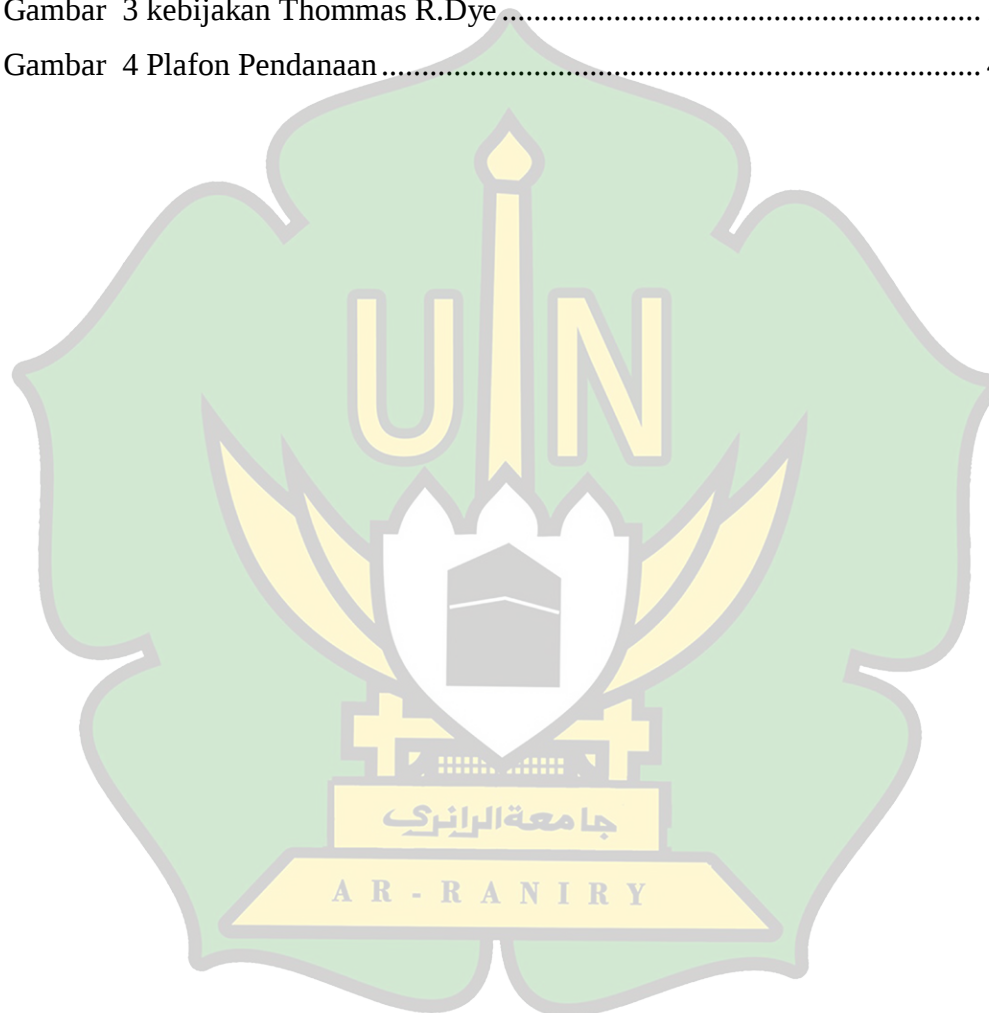
LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.	ii
ABSTRAK.	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Identifikasi Rumusan Masalah.....	3
3.1 Tujuan Penelitian	3
4.1 Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Kebijakan Publik.....	5
2.1.1 Pengertian Kebijakan	5
2.1.2 Tahapan Kebijakan.....	6
2.2 Implementasi Kebijakan	9
2.3 Pembangunan.....	14
2.3.1 Pengertian Pembangunan.	16
2.3.2 Evolusi dan Pergeseran Makna Pembangunan.....	21
2.3.3 Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan.....	27
2.4 Penelitian Relevan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Sumber Data	35
3.4 Infoman Penelitian.....	35

3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.2 Pembangunan dan Strategi Pembangunan.	42
4.3 Implementasi Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Pidie 2017-2020.....	48
4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.	58
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Siklus Kebijakan William N Dunn.....	9
Gambar 2 Sistem Politik David Easton.....	12
Gambar 3 kebijakan Thommas R.Dye.....	13
Gambar 4 Plafon Pendanaan.....	42



DAFTAR TABEL

Table 1 Informan Penelitian.....	35
Table 2 Luas Wilayah dan Luas Area Pertanian Kabupaten Pidie	38
Table 3 Visi, Misi, Tujuan , Sasaran dan Strategi Kabupaten Pidie Mengenai Pertanian.....	45
Table 4 Realisasi Pendanaan Pembangunan 2017-2018.....	49
Table 5 Alokasi Anggaran Pertanian 2019 dan 2020.....	52





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dengan Narasumber	63
Lampiran 2 Kuisisioner Penelitian	66
Lampiran 3 SK Skripsi.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Urgensi pembangunan pertanian untuk pembangunan nasional khususnya untuk pembangunan daerah tidak terbantahkan lagi. Namun dalam tatanan implementasinya di negara-negara berkembang masih mengalami tantangan.. Kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang khususnya Indonesia seringkali terdapat tidak konsistennya apa yang secara formal tertuang dalam dokumen rencana pembangunan atau RPJM dengan tatanan pelaksanaan dan implementasi kebijakan di sektor pembangunan ekonomi khususnya di sektor pertanian.

Sektor pertanian telah di akui memegang peranan penting dalam kontribusi dalam pembangunan ekonomi terutama dalam mendorong pendapatan domestik bruto (PDB) di Indonesia. Karena lebih 60% penduduk Indonesia menempati pedesaan dan tentunya pekerjaan yang di lakukan adalah bertani¹.

Maka Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peraturan perundang-undangan mewajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat daerah maupun kota khususnya di Kapupaten Pidie. Rencana pembangunan disusun guna menjabarkan visi dan misi serta program kepala daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,kebijakan umum dan program pembangunan daerah, program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, serta indikator kinerja daerah.Rencana Pembangunan Jangka

¹ Prabowo Subianto , *Paradoks Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2011), hlm. 114.

Menengah Daerah (RPJMD) adalah pedoman perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan. Pastinya, Rencana strategis pemerintah sudah termasuk kedalam dokumen pembangunan khususnya di bidang pertanian.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2017–2022 merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pidie Tahun 2006–2026, yang telah ditetapkan melalui Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pidie Tahun 2006–2026.

Melalui dinas pertanian dan peternakan kabupaten Pidie, telah merilis berbagai program. Seperti, program peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, pemasaran produksi pertanian/perkebunan, penerapan teknologi dan peningkatan produksi. Untuk membatasi ruang lingkup, penulis akan fokus pada penelitian tanaman pangan (*food crops*) yang menfokuskan pada sektor pembangunan tanaman padi.

Sehubungan dengan rencana strategis, kabupaten Pidie memiliki pertanian tanaman pangan terdiri atas kawasan pertanian lahan basah seluas 26.648,63 Ha tersebar di 23 (dua puluh tiga) kecamatan dan kawasan pertanian lahan kering seluas 1.101,46 Ha tersebar di Kecamatan Muara Tiga, Batee, Tiro/Truseb, Tangse, Geumpang dan Mane. Sedangkan untuk kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 26.826,90 Ha seluruh kecamatan di Kabupaten Pidie kecuali Kecamatan kota Sigli dengan masing-masing luasan yang berbeda.

Berdasarkan hasil observasi, produksi padi di Kabupaten Pidie sempat mengalami kenaikan dari 5.60 ton/ha pada tahun 2015 menjadi 6.03 ton/ha pada tahun 2016². Hasil Produksi positif ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Pidie dalam menyusun rencana strategis kedepan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan informasi yang di peroleh dari masyarakat di Pulo Mesjid, Kecamatan Tiro/Truseb. Perencanaan yang di gunakan oleh pemerintah Kabupaten Pidie Maka dugaan awal ialah perencanaan belum ada pembangunan yang signifikan pada sektor pertanian di Kabupaten Pidie tahun 2017-2020.

Sehingga oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang perencanaan untuk peningkatan pembangunan pertanian di Kabupaten Pidie dengan tema **“Analisis Rencana Strategi Dan Pembangunan Kabupaten Pidie Pada Sektor Pertanian 2017-2020”**

1.2. Identifikasi Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin menyimpulkan beberapa rumusan masalah maka di dapatkan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan dan strategi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam meningkatkan pembangunan di sektor pertanian?
2. Sejauhmana implementasi pembangunan sektor pertanian di kabupaten Pidie selama 2017-2020?

² Sumber : Pidie Dalam Angka 2015 dan 2016

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan dan strategi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam pembangunan sektor pertanian
2. Untuk mengetahui capaian pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pidie.

1.4. Manfaat Penelitian

1.1 Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2.1 Secara Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang kebijakan pemerintah .



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Dalam mengadakan penelitian tentang implementasi kebijakan publik. Terlebih dahulu kita harus memahami tentang pendefinisian kebijakan publik. Kebijakan merupakan suatu konsep di Ilmu Politik³. Kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan yang menghasilkan keputusan oleh perorangan atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan atau untuk mencapai tujuan tertentu⁴. Pada dasarnya, pihak yang terlibat dalam membuat kebijakan tentunya memiliki kekuasaan dan punya legitimasi untuk menjalankannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang ingin menyelesaikan permasalahan dengan cara menekankan setiap proses untuk bisa mencapai tujuannya, yaitu :

- 1) Kebijakan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat
- 2) Kebijakan dibuat secara dengan tahapan yang sistematis sehingga bisa menjadi solusi dan jawaban atas permasalahan yang terjadi.
- 3) Kebijakan perlu di implementasi oleh unit pelaksana. Kemudian harus di evaluasi untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak untuk menjawab permasalahan dalam mencapai tujuan.

³ EM. Lukman Hakim, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2011), hlm. 114.

⁴*Ibid.* hlm 20

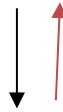
2.1.2 Tahapan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan kegiatan yang sangat kompleks karena membutuhkan serangkaian proses. Tahap dalam penilaian pada bagan di bawah ini bukan merupakan akhir dari pembuatan kebijakan, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni perubahan kebijakan atau penghentian kebijakan. Untuk setiap kebijakan terdapat proses-proses yang sistematis⁵. Dunn menjelaskan bahwa pentingnya tahapan proses kebijakan untuk mencapai arah dan tujuan bersama, akan tetapi hal yang sangat terpenting dari kebijakan ialah umpan balik setelah kebijakan di terapkan.



⁵Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003). Hlm. 24 - 25

Pemantauan dari hasil kebijakan yang telah diterapkan



Evaluasi kebijakan

Kesimpulan terhadap kebijakan, apakah sesuai dengan fakta yang terjadi atau harus ada pembenahan terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan fakta yang ada

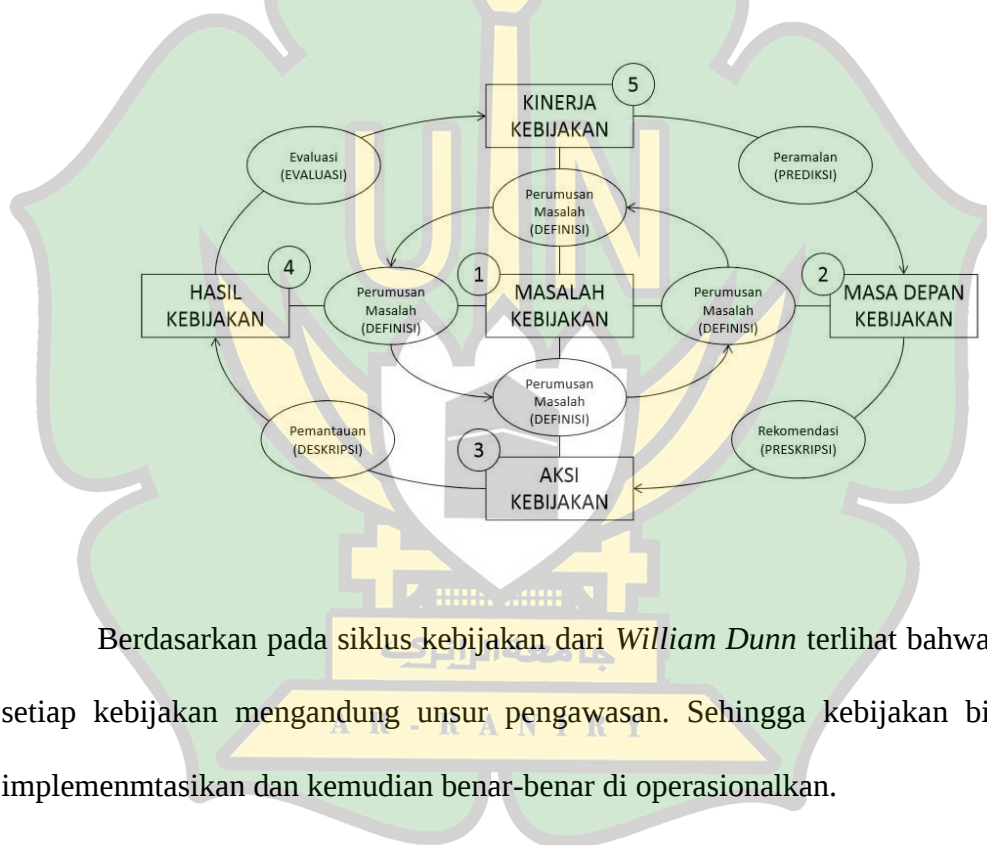
Anderson mengartikan kebijakan adalah (*a purposive corse of problem or matter of concern*) suatu tindakan yang di lakukan sengaja untuk dapat memecah masalah yang sedang di hadapi, dan perlu di ikuti oleh pembuat kebijakan tersebut. Sedangkan pengertian mengenai kebijakan publik di sisi lain menurut Carter V Good, kebijakan adalah pertimbangan atas suatu nilai terhadap faktor yang bersifatnya situsional, yang di jalankan secara umum serta ada bimbingan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Kebijakan publik merupakan respon komunikasi dua arah terhadap kondisi atau permasalahan yang sedang terjadi. Kebijakan publik yang di maksud adalah tentang prorgam kerja dari pemda Kabupaten Pidie yang terpilih pada pilkada serentak 2017-2022 yaitu Roni Ahmad (Abusyik) – Fadhlullah TM Daud. Berkenanan dengan program *Glee, Blang, Laot* yang sudah menjadi RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) 2017-2022, maka penulis ingin melihat lebih mendalam dengan sub *Blang (Sawah, pertanian)*.

Dunn, menganalisis bahwa kebijakan juga merupakan suatu proses

penelitian. Kebijakan di lakukan secara terus menerus dengan cara di lakukan penelitian terhadap suatu masalah kebijakan. Kemudian oleh analisis melakukan penyajian informasi untuk berdasarkan data atau fakta dalam bentuk informatif. Sehingga hal ini merupakan sebuah siklus yang terus di laksanakan. Sedangkan siklus menurut *Dunn* ialah sebagai berikut:

Gambar 1 Siklus Kebijakan William N



Berdasarkan pada siklus kebijakan dari *William Dunn* terlihat bahwa pada setiap kebijakan mengandung unsur pengawasan. Sehingga kebijakan bisa di implemenmtasikan dan kemudian benar-benar di operasionalkan.

2.2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak akan berarti apa-apa jikalau tidak di laksanakan. *Chief J.O.Udoji* mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan sangat penting, bahkan lebih penting daripada

pembuatan kebijaksanaan itu sendiri. Karena kalau tidak di laksanakan maka kebijakan hanya rumusan yang akan tersusun rapi dalam arsip”⁶. Karena di dalam kebijaka dan program pemerintah yang sudah di putuskan harus di implementasikan untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama.

a. Tahap Implementasi Kebijakan

Dalam penedekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approaches*) mengatakan bahwa implementasi sebagai berikut:

- 1) Mendasain program kerja berserta perumusan tugas yang jelas, menentukan ukuran kerja baik biaya maupun waktu yang lebih efisien.
- 2) Melaksanakan program, dengan menggunakan unit-unit kerja yang sudah di tetapkan, dana dan sumber yang tersedia, prosedur yang tepat serta metode yang akurat.
- 3) Membangun sistem penjadwalan, dengan memonitoring dan pengawasan yang tepat agar program berjalan sesuai rencana yang telah di tetapkan.

Dari rangkaian di atas bahwa konsep implementasi menurut proseduran dan manajerial adalah mendesain program, melaksanakan program, dan melakukan pengawasan. Ada kemungkinan ada ketidakefektivitas kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah. Hal tersebut di sampaikan oleh *Andrew Dunsire* “ karena adanya *Implementacy Gap* (kesenjangan kebijakan). Bahwa setiap kebijakan yang telah di laksanakan pemerintah tidak selamanya berjalan lancar,

⁶ Wahab, Sholichin Abdul. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. (Jakarta: Bumi Aksara,2008). Hlm.5-7

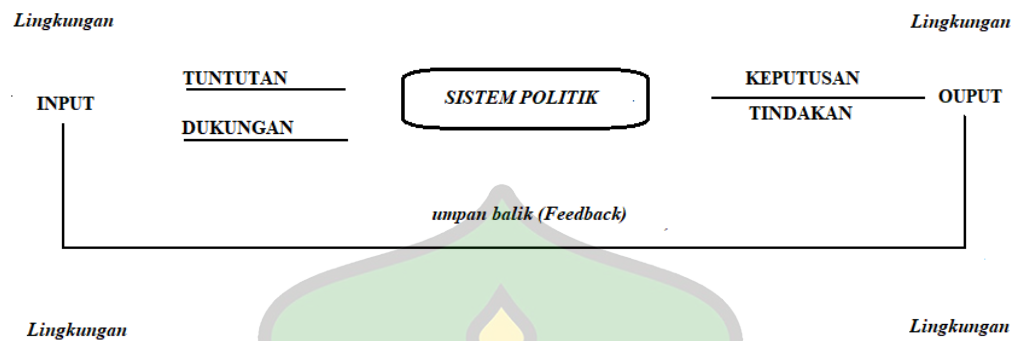
tentunya ada kesenjangan yang terjadi antara kebijakan yang di buat dengan yang di rencanakan. Besar dan kecilnya kesenjangan yang akan muncul tergantung dari aktor atau organisasi implementer untuk bisa berhasil dan bisa mencapai tujuan kebijakan sehingga kebijakan yang telah di tetapkan dalam dokumen bisa tercapai (*Implementation Capacity*⁷).

Dengan adanya kebijakan di harapkan kebijakan bisa tercapai dalam mencapai tujuannya. Namun menurut peneliti bahwa, kebijakan bukan hanya tanggung jawab dari lembaga administratif untuk bisa menekankan ketaatan pada kelompok sasaran saja. Akan tetapi, tersebut juga menyangkut pada kekuatan politik seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta *Interest Group* (kelompok-kelompok kepentingan) pada roda perekonomian. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung juga akan memepengaruhi pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan.

Tulisan *David Easton* yang berjudul *An Approach to The Analysis of Political Systems* yang sistematis, kebijakan merupakan suatu respon terhadap keadaan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya). Sistem politik itu sendiri terdiri dari berbagai lembaga-lembaga dan sejumlah aktivitas-aktivitas masyarakat yang merubah tuntutan (*demands*), dukungan (*Supports*), serta sumber-sumber daya (*recource*), sehingga menjadi

⁷*Ibid .hlm 61*

Gambar 2 Sistem Politik David Easton



melakukan suatu atau tidak melakukannya. Sedangkan dukungan, juga dapat berasal dari berbagai pihak, baik secara personal maupun dari masyarakat untuk dapat di proses lebih lanjut. Tuntutan sangat bergantung dari sumber-sumber yang yang menopangnya atau bisa saja mati sebelum di proses. Proses tuntutan untuk dapat di proses dan bisa masuk ke dalam sistem politik akan mengalami tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungan. Lingkungan disini berupa lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, partai-partai politik, kelompok kepentingan, media massa, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, struktur birokrasi, prosedur dan mekanisme politik, sikap dan perilaku pembuat keputusan⁹.

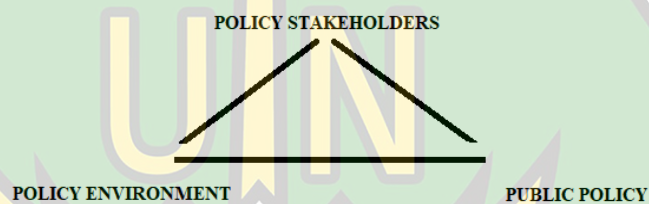
Semua itu di sebut dengan sistem politik secara keseluruhan yang berinteraksi dengan satu sama lain dalam satu kegiatan atau proses yang mengubah masukan menjadi keluaran. Proses ini disebut dengan konversi, hasil tersebut kemudian berubah menjadi kebijakan publik.

⁸Ibid.. hlm 76

⁹Wibowo, E., Subandini, M., & Tangkilisan, H. N. S. (2004). *Hukum dan Kebijakan publik*.

Pendekatan dalam suatu kebijakan, menunjuk pada batasan diatas dan seterusnya akan memanfaatkan pendekatan sistem. Karenapengimplementasian kebijakan lebih tepat dipahami dalam setiap prosesnyadengan berbagai macam subsistem yang ada. *Hofferbert* menyebut sistem sebagai *contexts* lengkapnya adalah *policy is made in variety contexts. Different context produce different policies*¹⁰.

Gambar 3 kebijakan Thommas R.Dye



Di pahami secara sistematis bahwa kebijakan suatu sistem yang memiliki tiga komponen yang berinteraksi satu sama lain. Penjelasan lebih lanjut pada gambar i.iv sebagai berikut :

- a. *Public Stakeholder*, ialah pemangku kepentingan atau kepala pemerintahan non pemerintah yang mempunyai legalitas terhadap sebuah kebijakan. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan bahkan juga bisa terpengaruh dari kebijakan itu sendiri.

¹⁰Suandi, I. W. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1).

- b. *Public Environment*, yang di maksud adalah bukan dari lingkungan dari luar administratif dari lembaga-lembaga pemerintah atau non pemerintah yang menentukan kebijakan melainkan adalah bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu di pengaruhi oleh kebijakan.
- c. *Public Policy*, serangkaian yang di lakukan atau tidak di lakukan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan dan masalah yang sedang di hadapi di dalam kehidupan masyarakat sebagaimana yang di jelaskan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas pastinya proses kebijakan tidak hanya di lakukan oleh satu komponen saja itu sendiri. Hubungan komponen yang paling menonjol di tunjukan oleh pelaku kebijakan. Pada posisi tersebut akan ada potensi pembenturan masukan atau saran yang banyak sekali untuk di masukan dalam kebijakan. Hal ini selaras dengan teori-teori sosial, setiap individu memiliki *verted interest* sendiri-sendiri yang sering sekali berbeda. Jika mengacu pada teori ini, maka pembuatan rumusan kebijakan akan selalu bersifat politis¹¹.

2.3 Pembangunan

Ide kemajuan seharusnya tidak diidentikkan dengan perspektif spasial. Kemajuan yang sering dirinci melalui strategi keuangan dalam berbagai cara terbukti efektif. Hal ini dapat digambarkan antara lain di Singapura, Hong Kong, Australia, dan negara-negara ciptaan lainnya. Strategi keuangan di negara-negara ini sebagian besar dipikirkan dengan matang dengan memasukkan pertimbangan

¹¹Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi aksara.

dari perspektif sosial dan ekologis dan didukung oleh instrumen politik yang dapat diandalkan sehingga setiap pengaturan moneter dapat dijelaskan kembali secara langsung, wajar, dan memenuhi standar pengaturan. Dalam perspektif sosial, bukan hanya tujuan daerah saja yang diperhatikan, keberadaan yayasan sosial (modal sosial) juga tetap dipertahankan dan ditingkatkan kapasitasnya. Untuk sementara, dalam sudut pandang ekologi, bagian dari konservasi modal normal juga penting untuk mendukung umat manusia. Dari semua itu, menariknya, arah independen juga sangat bersih dari berbagai praktik kampanye yang memiliki seluk-beluk kebutuhan (moral risk) yang dipuaskan oleh kepentingan tertentu (personal stake) dari keuntungan sederhana (lease chase). Oleh karena itu, efek samping perbaikan dapat dinikmati oleh seluruh daerah bahkan secara lintas (memasuki) batas ruang (antar kecamatan) dan waktu (antar usia). Konsekuensinya adalah bahwa penyelidikan sudut spasial ternyata kurang relevan dalam keadaan persis seperti yang digambarkan di atas.

Bagaimanapun, ide yang diungkapkan di atas dengan pengembangannya terkonsentrasi seperti halnya pelaksanaannya di berbagai negara dan lokasi, mengungkap berbagai kekurangan. Kekurangan-kekurangan ini muncul bersamaan dengan terungkapnya keanehan-keanehan biasa, antara lain, kebutuhan, administrasi publik yang besar, instrumen institusional yang lemah, dan kerangka politik yang keji. Kekurangan-kekurangan ini menjadi alasan hambatan bagi perkembangan dan arus penduduk, tenaga kerja dan produk, pencapaian, dan manfaat (keuntungan) dan beban (biaya) di dalamnya. Semua aset moneter dan non-finansial menjadi dimutilasi dalam alirannya sehingga

perbedaan menjadi jauh lebih serius. Dengan demikian, hasil kemajuan tidak sulit untuk dilacak antar distrik, area, pertemuan lokal, dan penghibur keuangan. Terbukti, ada pula pembagian waktu yang dicerminkan oleh keragu-raguan aset lancar karena sarat dengan berbagai bahaya (biaya kebebasan transien makam tinggi). Keadaan saat ini tidak hanya jauh dari kebajikan tetapi juga kesan penghapusan (dalam pengelolaan). Anggota fundamental dalam masalah di atas adalah sistem pasar yang bekerja tanpa batas. Tindakan ini tidak dapat berhasil karena ia bekerja sangat besar, terus-menerus, dan dapat diakui oleh alasan keuangan yang didukung oleh sebagian besar pendekatan moneter secara efisien.

Pola globalisasi dan regionalisasi menghadirkan kesulitan dan celah baru bagi interaksi kemajuan di Indonesia. Di saat seperti ini, tingkat persaingan antar financial entertainer (unsur bisnis dan juga negara) akan semakin terasah. Dalam kondisi yang sangat agresif ini, setiap financial entertainer (apa pun yang terjadi) mengeksekusi dan melakukan teknik kejam yang kuat, efektif, dan pas (Kuncoro, 2004). Dalam pengaturan inilah "prosedur yang diharapkan" mutakhir untuk memenangkan oposisi dalam iklim hiperkompetitif membutuhkan tiga hal awal, impian kemajuan dan gangguan. Kedua, kemampuan, dengan mengikuti dan mengembangkan batas yang dapat beradaptasi dan cepat bereaksi terhadap setiap perubahan. Ketiga, strategi yang berdampak pada heading dan pengembangan pesaing.

2.3.1 Pengertian Pembangunan

Hipotesis kemajuan dalam sosiologi dapat dipisahkan menjadi dua model ideal yang signifikan, modernisasi. Pandangan dunia modernisasi menggabungkan

spekulasi skala besar tentang perkembangan moneter dan perubahan sosial dan hipotesis mini tentang kualitas individu yang mendukung jalannya kemajuan. Pandangan dunia ketergantungan menggabungkan hipotesis keterbelakangan, pergantian peristiwa dan hipotesis kerangka dunia, sesuai pengelompokan Larrain (1994). Sementara itu, Tikson (2005) membaginya menjadi tiga kelompok hipotesis perbaikan, yaitu modernisasi, keterbelakangan, dan ketergantungan. Dari model ideal yang berbeda ini, muncul adaptasi yang berbeda dari pemikiran perbaikan.

Makna kemajuan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk dibahas. Mungkin tidak ada satu disiplin yang paling mencirikan kata perbaikan. Hingga saat ini telah tercipta perkembangan pemikiran tentang kemajuan, berjalan menurut sudut pandang sosiologis gaya lama, perspektif Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme dengan modernisasi yang meningkatkan audit awal dari pergantian peristiwa sosial, hingga pergantian peristiwa yang layak. Meskipun demikian, ada pokok-pokok pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Untuk situasi ini, perbaikan dapat dicirikan sebagai pekerjaan yang terorganisir untuk membuat pilihan yang lebih otentik bagi setiap penduduk untuk memuaskan dan mencapai keinginannya yang paling. Topik utamanya adalah koordinasi, yang mengisyaratkan perlunya tindakan penataan seperti yang telah diulas sebelumnya. Subjek selanjutnya adalah pembentukan opsi lain yang lebih nyata. Ini berarti bahwa perbaikan harus diatur terhadap keragaman di semua bagian kehidupan. Ada juga sistem yang meminta pembentukan organisasi dan undang-undang yang diyakini dapat memainkan pekerjaan yang efektif, langsung, dan masuk akal.

Topik ketiga adalah mencapai sebagian besar keinginan manusia, yang menyiratkan bahwa kemajuan harus diarahkan untuk menangani masalah dan mendorong kualitas moral dan moral individu.

Mengenai arti perbaikan, para ahli memberikan definisi yang berbeda seperti persiapan. Istilah kemajuan dapat diuraikan secara beragam oleh satu orang ke orang lain, dimulai dari satu bidang lalu ke bidang berikutnya, dimulai dari satu negara lalu ke wilayah berikutnya. Namun secara keseluruhan terdapat pemahaman bahwa kemajuan merupakan interaksi untuk melakukan perubahan.

Siagian memberikan pengertian kemajuan sebagai “suatu karya atau rangkaian usaha pembangunan dan perubahan yang disusun dan dilakukan secara sengaja oleh suatu negara, negara dan pemerintah, menuju inovasi dalam rangka pembangunan negara”. Sedangkan Ginanjar Kartasmita memberikan kesepakatan yang tidak terlalu sulit, khususnya sebagai "jalan perbaikan melalui usaha yang tersusun.

Menjelang awal pergantian peristiwa, umumnya diharapkan ditemukan bahwa ada pertimbangan-pertimbangan yang mengakui kemajuan dengan perbaikan, perbaikan dengan modernisasi dan industrialisasi, dan bahkan perbaikan dengan *westernisasi*. Pertimbangan-pertimbangan ini tergantung pada bagian kemajuan, dimana kemajuan, perbaikan, dan modernisasi dan industrialisasi semuanya mengandung komponen kemajuan. Bagaimanapun, keempat hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok, karena masing-masing memiliki landasan, standar dan sifat alternatif hanya sebagai aturan

koherensi alternatif, meskipun masing-masing adalah struktur yang mencerminkan perubahan.

Peningkatan (advancement) adalah suatu proses kemajuan yang mencakup seluruh kerangka kerja yang bersahabat, seperti masalah pemerintahan, ekonomi, yayasan, penjagaan, pengajaran dan inovasi, organisasi, dan budaya (Alexander 1994). Mencirikan perbaikan sebagai perubahan moneter, sosial dan sosial. Kemajuan adalah interaksi perubahan yang diatur untuk bekerja pada berbagai bagian kehidupan individu.

Menurut Deddy T. Tikson bahwa kemajuan masyarakat juga dapat diartikan sebagai perubahan moneter, sosial dan sosial yang disadari melalui pengaturan dan sistem menuju arah yang ideal. Perubahan konstruksi keuangan, misalnya, harus terlihat melalui perluasan atau percepatan pembangunan di bidang modern dan administrasi, dengan tujuan agar komitmen mereka terhadap pembayaran publik semakin besar. Kemudian lagi, komitmen kawasan hortikultura akan berkurang dan berbanding terbalik dengan perkembangan industrialisasi dan modernisasi keuangan. Perubahan sosial harus terlihat melalui alokasi kelimpahan melalui penerimaan yang adil terhadap aset keuangan, seperti pengajaran, kesejahteraan, penginapan, air bersih, kantor olahraga, dan investasi dalam interaksi dinamis politik. Sementara itu, perubahan sosial sering dikaitkan, selain hal-hal lain, dengan kebangkitan jiwa patriotisme dan patriotisme, meskipun perubahan kualitas dan standar yang diambil oleh masyarakat, seperti perubahan dari mistisisme ke realisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian

tinggi ke otoritas material, dari pendirian konvensional ke asosiasi saat ini dan kebijaksanaan.

Oleh karena itu, interaksi kemajuan terjadi di semua bagian kehidupan daerah, moneter, sosial, sosial, politik, yang terjadi pada tingkat skala penuh (publik) dan miniatur (daerah/kelompok). Arti penting dari kemajuan adalah kemajuan, perkembangan dan perluasan. Seperti yang diungkapkan oleh para ahli di atas, kemajuan adalah suatu proses kemajuan yang dibantu melalui upaya sadar dan terencana. Sedangkan perbaikan adalah suatu perjalanan kemajuan yang terjadi secara normal.

Dengan semakin rumitnya kehidupan individu termasuk berbagai sudut pandang, kemungkinan modernisasi pada saat ini tidak hanya mencakup bidang moneter dan modern, namun telah memasuki segala perspektif yang dapat mempengaruhi kehidupan individu. Akibatnya, modernisasi dicirikan sebagai suatu perjalanan perubahan dan perubahan di mata publik yang menggabungkan setiap sudut pandangnya, terlepas dari apakah moneter, modern, sosial, sosial, dan lain-lain.

Karena dalam interaksi modernisasi terdapat suatu alur kemajuan yang mendorong perbaikan, kemajuan maka para ahli menganggapnya sebagai suatu siklus kemajuan dimana terdapat suatu alur kemajuan dari kehidupan adat ke kehidupan sekarang, yang pada mulanya dipisahkan oleh pemanfaatan masa kini. perangkat zaman sekarang, menggantikan perangkat zaman sekarang. - instrumen adat.

Selain itu, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk sosiologi, kemajuan para ahli eksekutif terus mencari untuk menyelidiki ide-ide kemajuan secara deduktif. Dalam istilah langsung, perbaikan secara teratur diartikan sebagai pekerjaan untuk membuat perbaikan. Karena penyesuaian penyelidikan adalah menuju berkembang dari keadaannya yang unik, tidak mengherankan bagi sebagian orang untuk berharap bahwa peningkatan juga pengembangan. Seiring perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan suatu peraturan yang dapat menampik anggapan tersebut. Bagaimanapun, untuk memiliki pilihan untuk mengenali keduanya tanpa memisahkan batas secara jelas, Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan berpendapat, "Maju sebagai perubahan, memahami lingkungan negara dan wilayah sehari-hari yang lebih unggul daripada saat ini. kondisi, sedangkan perbaikan sebagai perkembangan menunjukkan kemampuan suatu kumpulan untuk terus berkreasi, baik secara subjektif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi untuk dikembangkan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kemajuan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan, karena pembangunan dapat menyebabkan pembangunan dan pembangunan akan terjadi karena perbaikan. Untuk situasi ini, pengembangan dapat berupa perluasan atau peningkatan latihan yang diselesaikan oleh daerah setempat.

2.3.2 Evolusi dan Pergeseran Makna Pembangunan

Biasanya, kemajuan menyiratkan ekspansi konstan dalam Produk Domestik Bruto suatu negara. Bagi daerah, kepentingan adat kemajuan dipusatkan

pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDB) suatu wilayah, wilayah, atau kota. Meskipun demikian, kemudian muncul makna elektif dari kemajuan finansial yang menggarisbawahi perluasan pembayaran per kapita (per capita pay). Definisi ini menggarisbawahi kapasitas suatu negara untuk memperluas hasil yang dapat melampaui pembangunan penduduk. Pengertian perbaikan secara konvensional sering dihubungkan dengan suatu teknik untuk mengubah konstruksi suatu bangsa atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Komitmen mulai digantikan dengan komitmen modern. Definisi yang secara umum akan memandang pada bagian kuantitatif dari kemajuan ini dianggap penting untuk melihat petunjuk-petunjuk sosial yang.

Pandangan dunia peningkatan tingkat lanjut melihat contoh yang tidak sama dengan peristiwa keuangan konvensional. Penyelidikan dimulai dari apakah semua petunjuk moneter memberikan gambaran kesuksesan. Beberapa ahli keuangan terdepan telah mulai memajukan penghapusan GNP (penurunan posisi tinggi pembangunan moneter), mengurangi garis kemiskinan, pengangguran, penyampaian pembayaran yang semakin tidak konsisten, dan mengurangi tingkat pengangguran saat ini. Panggilan analisis pasar ini mencapai penyesuaian pandangan dunia kemajuan, yang menunjukkan bahwa peningkatan harus dilihat sebagai siklus multi-segi. Beberapa ahli menyarankan bahwa kemajuan provinsi harus memasukkan tiga keyakinan dasar :

1. Fleksibilitas: kapasitas untuk menangani isu-isu penting (makanan, perlindungan, kesejahteraan, dan keamanan) untuk mendukung kehidupan.

2. Keyakinan : kemajuan harus mengakulturasi individu. Dari perspektif ekspansif, kemajuan sebuah ruang harus memperluas kebanggaan sebagai individu di sekitar sana.
3. Kemandirian: penaklukan kesempatan bagi setiap orang dalam suatu negara untuk berpikir, berkreasi, bertindak, dan berusaha mengambil bagian untuk dikembangkan.

Selain itu, kemajuan pentingnya perbaikan membawa perubahan pada pentingnya kemajuan. Menjelang akhir tahun 1960-an, banyak negara non-industri mulai memahami bahwa "perkembangan moneter" tidak terlepas dari "pergantian peristiwa keuangan". Pembangunan keuangan yang tinggi, yang pada dasarnya mencengangkan negara-negara maju pada tahap awal kemajuan mereka, pasti dapat dicapai tetapi disertai dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan provinsi, alokasi gaji yang tidak konsisten, dan sifat canggung yang utama. Hal ini juga tampaknya memperkuat keyakinan bahwa pembangunan moneter merupakan syarat penting namun tidak memadai untuk siklus kemajuan . Perkembangan keuangan hanya mencatat perluasan penciptaan tenaga kerja dan produk secara luas, sedangkan peningkatan memiliki aspek yang lebih luas dari sekedar peningkatan pembangunan moneter.

Ini menandakan dimulainya waktu evaluasi ulang tentang pentingnya kemajuan. Menurut Myrdal, misalnya, mencirikan perbaikan sebagai pengembangan vertikal dari keseluruhan kerangka kerja yang bersahabat. Ada juga orang-orang yang menggarisbawahi pentingnya pembangunan dengan perubahan, terutama perubahan kualitas dan pendirian. Pada akhirnya,

peningkatan keuangan tidak lagi memuji GNP sebagai target pertumbuhan, tetapi nol dalam kecenderungan lebih jauh ke arah sifat interaksi peningkatan.

Praktek yang dikembangkan di banyak negara, pada dasarnya pada tahap awal kemajuan sebagian besar berpusat di sekitar pengembangan penciptaan. Meskipun terdapat banyak variasi penalaran, pada dasarnya semboyan yang dikembangkan adalah pengaturan modal. Dengan demikian, prosedur pemajuan yang dianggap paling tepat adalah mempercepat pembangunan moneter dengan menyambut modal asing dan industrialisasi. Tugas (SDM) dalam sistem semacam ini hanyalah “instrumen” atau salah satu dari “unsur penciptaan”. Orang-orang ditetapkan sebagai instrumen dan tidak diekspos untuk perbaikan. Penekanan pada nilai penciptaan dan kegunaan telah menurunkan orang sebagai hambatan untuk memperluas pemenuhan dan memperkuat manfaat.

Oleh karena itu, menggarap hakikat SDM ditujukan untuk memperluas kreasi. Hal inilah yang disinggung sebagai kemajuan aset manusia dalam sistem penciptaan yang terfokus pada pergantian peristiwa. Ini cenderung dianggap dengan asumsi subjek pembicaraan dalam sudut pandang kemajuan semacam itu, pandangan dunia terbatas pada masalah sekolah, peningkatan kemampuan, kesejahteraan, koneksi dan kecocokan, dll. Kualitas manusia yang dikembangkan lebih lanjut merupakan hal penting yang signifikan dalam siklus penciptaan. dan memenuhi kebutuhan budaya modern. Satu lagi pilihan dalam teknik kemajuan manusia adalah hal yang disebut individu-individu yang terfokus pada peristiwa atau individu-individu terkemuka terlebih dahulu (Korten, 1981 dalam Kuncoro, 2004). Ini menyiratkan bahwa orang (individu) adalah tujuan utama perbaikan,

dan kemauan dan batas manusia adalah aset utama. Aspek kemajuan semacam ini jelas lebih luas dari sekadar membentuk orang-orang yang cakap dan berbakat sehingga mereka berharga dalam interaksi penciptaan. Penataan manusia sebagai subjek perbaikan menonjolkan arti penting penguatan manusia, khususnya kapasitas manusia untuk melengkapi seluruh kapasitas terpendamnya.

Sejarah mencatat munculnya model-model ideal baru yang dikembangkan seperti pembangunan dengan alat angkut, kebutuhan dasar, pergantian peristiwa yang mandiri, peningkatan ekonomi dengan perhatian terhadap alam (ecodevelopment), kemajuan yang berfokus pada ketidakseimbangan upah sesuai identitas (ethno advance. Pandangan dunia ini sejenak dapat diringkas sebagai berikut:

1. Para pendukung teknik "pembangunan dengan penyebaran", atau "penataan ulang pembangunan", pada dasarnya mengusulkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pembangunan moneter (memperluas pergantian peristiwa "kue") tetapi juga memikirkan bagaimana pergantian peristiwa "kue" itu. disesuaikan. Hal ini dapat diketahui dengan campuran prosedur seperti memperluas pembukaan bisnis, menempatkan sumber daya ke dalam sumber daya manusia, berfokus pada peternak kecil, area kasual dan visioner bisnis dengan ekonomi lemah.
2. Metode untuk mengatasi kebutuhan dasar telah dengan cara ini mencoba untuk memasukkan semacam "memastikan" dengan

tujuan bahwa setiap kelompok yang paling rentan akan mendapat manfaat dari setiap program perbaikan.

3. Pembangunan "mandiri" telah muncul sebagai ide penting dalam pertemuan di seluruh dunia sebelum ide "Tata Ekonomi Dunia Baru" (NIEO) disusun dan mengajukan ide-ide memikat untuk partisipasi daripada menarik diri dari lapangan di seluruh dunia.
4. Pentingnya metodologi pengembangan lingkungan, yang pada dasarnya mengatakan bahwa jaringan dan sistem biologis dalam suatu ruang harus tumbuh bersama menuju kegunaan yang lebih tinggi dan kepuasan persyaratan; namun secara khusus, teknik perbaikan ini harus ekonomis baik secara alami maupun sosial.
5. Sampai saat ini, hanya Malaysia yang masih ingat dengan gagasan eco-development untuk perincian New Economic Policy (NEP). NEP direncanakan dan digunakan untuk menjamin bahwa produk perbaikan dapat dibagi secara adil di antara semua penduduk, terlepas dari apakah dari kelompok orang Cina, India dan asli Malaysia.

2.3.3 Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

Penggunaan faktor dan penanda kemajuan dapat berbeda untuk setiap negara. Di negara-negara yang masih lemah, proporsi kemajuan dan kemajuan mungkin masih terkait dengan kebutuhan dasar seperti, kekuasaan untuk daerah pedesaan, administrasi kesejahteraan negara, dan biaya rendah sumber makanan

pokok. Bergantian, di negara-negara yang memiliki pilihan untuk mengatasi masalah ini, petunjuk perbaikan akan pindah ke variabel tambahan dan tersier.

Berbagai penanda keuangan yang dapat digunakan oleh yayasan di seluruh dunia termasuk pembayaran per kapita (GNP atau PDB), desain moneter, urbanisasi, dan dana investasi lengkap. Selain itu, ada pula dua petunjuk berbeda yang menunjukkan kemajuan perbaikan keuangan suatu negara atau daerah, khususnya Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut ini akan dipaparkan sinopsis Deddy T. Tikson tentang lima penanda tersebut:

1. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita, baik sejauh GNP dan PDB, adalah salah satu penanda moneter skala besar yang telah lama digunakan untuk mengukur perkembangan keuangan. Secara makroekonomi, pointer ini merupakan bagian dari bantuan manusia pemerintah yang dapat diperkirakan, sehingga dapat menggambarkan bantuan pemerintah dan perkembangan daerah setempat. Tampaknya pembayaran per kapita telah berubah menjadi penanda ekonomi makro yang tidak dapat diabaikan, meskipun memiliki beberapa kekurangan. Maka perkembangan pembayaran publik, selama ini, telah dimanfaatkan sebagai tujuan kemajuan di negara-negara terbelakang. Seolah-olah ada kecurigaan bahwa bantuan pemerintah dan kemajuan daerah itu secara alami ditunjukkan oleh ekspansi pembayaran publik (pembangunan moneter). Namun,

beberapa ahli menganggap penggunaan penanda ini untuk mengabaikan contoh pengiriman pembayaran publik. Petunjuk ini tidak mengukur penyaluran gaji dan alokasi bantuan pemerintah, termasuk penerimaan yang adil terhadap aset keuangan.

2. Struktur Ekonomi

Diharapkan bahwa kenaikan upah per kapita akan mencerminkan perubahan mendasar dalam ekonomi dan kelas sosial. Dengan perputaran keuangan dan peningkatan per kapita, komitmen wilayah assembling/modern dan administrasi terhadap pembayaran publik akan terus berkembang. Kemajuan daerah modern dan peningkatan tingkat kompensasi akan membangun minat untuk produk modern, yang akan diikuti oleh kemajuan usaha dan pengembangan angkatan kerja. Kemudian lagi, komitmen daerah pedesaan untuk membayar publik akan berkurang.

3. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai perluasan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah metropolitan dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi dengan asumsi bahwa pembangunan penduduk di wilayah metropolitan tidak ada artinya. Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, jumlah penduduk di wilayah metropolitan secara langsung relatif terhadap tingkat industrialisasi. Ini menyiratkan bahwa kecepatan urbanisasi akan

lebih tinggi sesuai dengan proses industrialisasi yang cepat. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah metropolitan, sedangkan di negara-negara non-industri sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan. Mengingat kekhasan ini, urbanisasi digunakan sebagai tanda kemajuan.

4. Angka Tabungan

Kemajuan kawasan assembling/modern pada tahap industrialisasi membutuhkan ventura dan modal. Modal moneter adalah faktor utama selama industrialisasi di masyarakat umum, seperti yang terjadi di Inggris secara keseluruhan di Eropa menuju awal perkembangan perusahaan bebas yang diikuti oleh transformasi modern. Pada masyarakat umum yang memiliki efisiensi tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui dana cadangan, baik swasta maupun pemerintah.

5. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Indeks Kualitas Hidup Fisik (PQLI) digunakan untuk mengukur bantuan pemerintah dan keberhasilan daerah setempat. Daftar ini dibuat sebagai penunjuk makroekonomi yang tidak dapat memberikan gambaran tentang bantuan pemerintah individu dalam memperkirakan pencapaian keuangan. Misalnya, pembayaran publik suatu negara dapat berkembang secara konsisten, namun tanpa diikuti oleh perluasan bantuan pemerintah yang ramah. Rekor ini ditentukan berdasarkan (1) masa depan normal pada usia

cukup satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) tingkat pendidikan. Dalam catatan ini, masa depan normal dan kematian bayi sebenarnya ingin menggambarkan status gizi anak dan ibu, status kesejahteraan, dan iklim keluarga yang secara langsung terkait dengan bantuan pemerintah keluarga. Pelatihan, yang diperkirakan dengan tingkat kemahiran, dapat menggambarkan jumlah individu yang mendekati pengajaran karena kemajuan. Variabel ini menggambarkan bantuan pemerintah daerah setempat, dengan alasan bahwa status keuangan keluarga yang tinggi akan mempengaruhi status pendidikan individunya. Oleh para produsennya, daftar ini dipandang luar biasa untuk memperkirakan kualitas manusia karena peningkatan, meskipun upah per kapita sebagai proporsi jumlah manusia.

6. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah menciptakan petunjuk kemajuan lainnya, terlepas dari penanda saat ini. Pemikiran penting yang menyembunyikan file ini adalah pentingnya fokus pada sifat SDM. Menurut UNDP, perbaikan harus diarahkan pada penciptaan SDM. Dalam pengaturan ini, perbaikan dapat diartikan sebagai siklus yang berarti mendorong keputusan yang dapat dibuat oleh orang-orang. Hal ini tergantung pada pemahaman bahwa bekerja pada sifat SDM akan diikuti oleh

berbagai keputusan dan kebebasan untuk memutuskan jalan keberadaan manusia secara terbuka.

Perkembangan finansial dipandang sebagai komponen penting dalam keberadaan manusia, namun tidak secara konsekuen mempengaruhi peningkatan harga diri dan kehormatan manusia. Dalam pergaulan ini, ada tiga bagian yang dianggap berkembang secara umum, umur panjang dan kokoh, pengadaan dan kemajuan informasi, dan peningkatan penerimaan pada kehidupan yang lebih tinggi. File ini dibuat dengan menggabungkan tiga bagian, (1) masa depan normal saat memasuki dunia, (2) pencapaian pembelajaran normal di tingkat dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah, (3) pembayaran per kapita ditentukan berdasarkan Paritas Daya Beli. Peningkatan manusia secara tegas diidentikkan dengan peningkatan kemampuan manusia yang dapat disimpulkan dalam perluasan informasi, perilaku dan kemampuan, terlepas dari status kesejahteraan semua kerabat dan keadaan mereka saat ini.

2.3. Penelitian Relevan

Kajian tentang pertanian tentunya sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak dari waktu ke waktu. Ada yang mengkaji kajian pertanian dari pandangan Sub ilmu pertanian murni, di lain sisi bidang pertanian diteliti dari pandangan ilmu sosial dan politis. Sehingga untuk mencapai penulisan yang ilmiah dan dengan didukung oleh fakta dan data yang sudah teruji, penulis

menjadikan beberapa tulisan sebagai pondasi dalam menulis karya ilmiah ini sebagai berikut :

- a. Karya ilmiah yang di tulis oleh Djoko Suseno dan Hempri Suyatna yang berjudul “*Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani*”¹². Pembahasan yang di bahas lebih tentang bagaimana pengaruh kebijakan yang populis tentang kebijakan di bidang pertanian. Pada tulisan ini menekankan sektor kebutuhan utama dari petani dalam mengembangkan sektor pertanian. Meskipun menyebutkan tentang cara menjadikan petani bisa lebih maju dalam bidang pertanian yang modern, akan tetapi tidak disinggung tentang pembangunan yang melihat sektor pertanian padi sebagaimana tujuan dari skripsi penulis.
- b. Jurnal yang di tulis oleh Sri Hery Susilowati tentang “*Fenomena Penuaan Petani Dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian*”¹³. Lebih tentang kekhawatiran pemerintah terhadap kurangnya minat pemuda untuk terjun dan mengembangkan sektor pertanian. Tulisan ini membandingkan dengan beberapa negara di Asia dan Eropa dalam hal peningkatan usia kerja di bidang pertanian. Selanjutnya karya ilmiah ini, meninjau ulang pembangunan yang

¹² Djoko, Hempri. “*Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani* ” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.10. No. 3, 2007

¹³ Sri “*Fenomena Penuaan Petani Dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian*”. Forum Penelitian Agro Ekonomi kementrian Pertanian Indonesia. Vol. 34 No. 1, 2016

terlaksana oleh pemerintah melalui kebijakan di bidang pertanian guna meningkatkan taraf hidup para petani di pendesaan.

- c. Karya yang di tulis Mujiburrahmad, Pudji Muljono dan Dwi Sadono tentang *“Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi¹⁴”*. Pembahasan yang menitik beratkan pada upaya-upaya tim penyuluh dari dinas pertanian Kab.Pidie dalam membina petani di pendesaan dan tidak fokus dalam mengkaji pendapatan petani



¹⁴ Mujiburrahmad, Pudji, Dwi *“Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi”*. Jurnal Penyuluhan Vol. No. 2, 2014

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ditunjukkan pada pengamatan fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang meneliti kondisi pada objek, sedangkan peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif akan menggunakan pengumpulan data secara observasi dan wawancara. Sedangkan data kualitatif akan berbentuk kata, kalimat dan gambar¹⁵.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif menghubungkan subjek dan objek saat sekarang berdasarkan fakta dan data yang terjadi.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun untuk lokasi penelitian, pembahasan ini akan berfokus di Pidie sebagai lokasi objek. Sebagai lokasi yang menerima kebijakan di bidang pertanian. Oleh karena itu, peneliti ingin lebih mendalam lagi dalam melihat kebijakan yang sudah dilakukan dengan rencana strategis dalam mewujudkan pembangunan sektor pertanian di Pidie.

¹⁵Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 8

3.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer di peroleh langsung berdasarkan pengamatan langsung dan hasil wawancara pada lembaga terkait pembuat kebijakan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dan Dinas terkait.

2. Data Skunder

Data skunder di peroleh langsung dari hasil yang di lakukan pada objek penelitian. Data tersebut berupa dokumen-dokumen (buku panduan rencana strategis, media, buku, jurnal,) yang terkait kebijakan terhadap pembangunan pertanian.

3.4 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid, maka di butuhkan informasi yang tepat dan akurat. Adapun untuk informan untuk permasalahan ini sebagai berikut:

Table 1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Fahlullah TM Daud	Wakil Bupati Pidie
2	Muzakkir	Plt Dinas Pertanian
3	Bakhtiar Ali	Kepala Desa Pulo Mesjid

4	Fajri	Petani
5	Agun Gunawan	Petani

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam melakukan penelitian. Tanpa melakukan pengumpulan data yang sesuai prosedur, maka peneliti tidak akan mendapatkan standar data yang telah ditetapkan¹⁶.

Teknik pengumpulan data adalah serangkain cara dan tahapan dalam mendapatkan data. Maka dengan begitu, peneliti menggunakan dua cara dalam melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara di lakukan dengan cara intens untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tema peneliti. Wawancara biasa di lakukan secara tidak terstruktur, jenis wawancara ini biasa lebih mendalam, intensif dan terbuka. Untuk wawancara sendiri di lakukan dengan adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dengan terwawancara (yang menjawab pertanyaan). Wawancara juga didefinisikan pertemuan antara *researcher* (peneliti) dengan *respondents* (penanggap), dimana jawaban dari *respondents* akan menjadi data mentah¹⁷.

b. Dokumentasi

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.308

¹⁷ Lisa Horizon.2007, Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 150-151

Kegiatan pengumpulan dengan cara dokumentasi yaitu dengan menghimpun data-data yang relevan dari buku-buku, jurnal, media sosial, surat kabar , dll. Kemudian dokumentasi juga di lakukan dengan mengambil foto-foto atau atau dokumen yang resmi yang berkaitan dengan kebijakan di kabupaten Pidie dalam hal ini peneliti merujuk pada Roni Ahmad (Abusyik) – Fadhlullah T.M Daud sebagai bupati dan wakil bupati Pidie.

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* (pengambilan sampel secara sengaja) yaitu pengambilan sampel untuk tujuan dan pertimbangan yang akurat agar bisa di jadikan respoden dan informan dalam penelitian ini¹⁸.

3.6 Teknik Analisis Data

Miles dan Hubberman mengemukakan teknik analisis data ialah aktivitas yang di lakukan secara terus menerus sampai tuntas, artinya sampai data itu jenuh. Kegiatan menganalisis data yang di maksud di bagi tiga tahap.

Pertama reduksi data, data yang didapatkan di lapangan sangat banyak maka tentunya perlu di catat secara teliti dan terperinci. Reduksi data ialah merangkum, mengkategorikan, memilih data yang penting dan tentunya yang relevan dengan permasalahan peneliti. Data yang telah di reduksi akan

¹⁸ Ahmadi, Cholid Narbuko Dan Abu. 2010 Metodologi Penelitian. Jakarta :PT. Bumi Aksara

memberikan gambaran dan kejelasan sehingga bisa membantu peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

Kedua penyajian data, setelah di lakukan reduksi data maka selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk: bagan, uraian singkat, keterangan kategori dan sebagainya. Miles dan Huberman menjelaskan biasanya penyajian data yang di lakukan dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain naratif, penyajian data juga sering di lakukan dengan matrik, gambar, grafik dan sebagainya.

Ketiga penarikan kesimpulan/verifikasi, kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ada penemuan data-data baru yang di dukung dengan bukti yang valid dan akurat. Namun, bila kesimpulan awal sudah adanya bukti yang valid maka peneliti kembali ke lapangan untuk mengambil data-data selanjutnya. Kesimpulan penelitian kualitatif di harapkan dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal. Akan tetapi bisa jadi tidak bisa, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah di lakukan penelitian di lapangan. Selanjutnya, pada akhirnya kesimpulan dari akhir penelitian di harapkan akan menemukan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan objek yang sebelumnya masih berbentuk gambak dan grafik, maka setelah ada nya penelitian sudah bisa di deskripsikan dengan jelas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pidie terdiri dari daerah rawa dan dataran tinggi, terletak antara 04.300 - 04.600 LU, 95.750 dan 96.200 BT. Wilayah Kabupaten Pidie memiliki luas daratan 3567.15 km². Di kabupaten Pidie diterdiri dari 23 kecamatan dan luas pertanian yang berbeda di setiap kecamatan. Luas wilayah pada setiap wilayah kecamatan tentu sangat berbeda. Wilayah yang mempunyai area yang luas belum tentu juga menyediakan lahan pertanian padi yang luas¹⁹.

Table 2 Luas Wilayah dan Luas Area Pertanian Kabupaten Pidie

No	Nama kecamatan	Luas (Km ²)	Luas Pertanian (Km ²)	%
1	Geumpang	594.64	14.18	2.38%
2	Mane	817.50	18.64	2.28%
3	Glumpang Tiga	59.70	26.50	44.39%
4	Glumpang Baro	45.30	16.57	36.58%
5	Mutiara	35.05	20.78	59.29%
6	Mutiara Timur	63.55	39.34	61.90%
7	Tiro/Truseb	255.00	25.74	10.09%
8	Tangse	755.00	24.03	3.18%
9	Keumala	27.57	23.55	85.42%
10	Titue	20.11	14.38	71.51%
11	Sakti	70.03	37.33	53.31%
12	Mila	21.32	15.59	73.12%
13	Padang Tiji	258.71	28.94	11.19%
14	Delima	43.89	17.14	39.05%
15	Grong-grong	19.41	2.86	14.73%

¹⁹ Sumber dari : *Rencana Strategis "DISTANBAN PIDIE" 2017-2022*.

16	Indrajaya	34.02	28.04	82.42%
17	Peukan Baro	30.00	18.95	63.17%
18	Kembang Tanjong	46.50	18.94	40.73%
19	Simpang Tiga	55.36	12.21	22.06%
20	Kota Sigli	9.75	0.00	0%
21	Bate	104.74	6.70	6.40%
22	Muara Tiga	162.00	11.34	7.00%
23	Pidie	38.00	13.62	35.84%
Jumlah		3567.15	435.20	

Sumber data di olah dari BPS Aceh dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pidie.

Berdasarkan data luas area dan luas pertanian, dapat dibagi dalam tiga (3) kategori : 1. Kecamatan dengan wilayah terluas 2. Kecamatan dengan luas area pertanian 3. Kecamatan dengan luas area pertanian berdasarkan persentase luas area. Hal ini terlihat jelas bahwa ada kecamatan yang luas tapi tidak menyediakan lahan pertanian yang luas juga, dan ada kecamatan yang kecil akan tetapi persentase luas area pertanian yang luas.

Selanjutnya, kecamatan yang memiliki area luas untuk lahan pertanian terdiri dari Mutiara Timur, Sakti, Padang Tiji, Indrajaya, dan Glumpang Tiga. Kecamatan tersebut memiliki musim tanam 2 kali dalam setahun seperti pada umumnya di kecamatan lainnya, yakni pada musim hujan dan musim kemarau dengan memanfaatkan aliran air dari hulu ke hilir pada melalui irigasi . Seperti hal nya Mutiara Timur dan Glumpang Tiga pada area kecamatan ini tidak ada sumber air asli melainkan memanfaatkan sumber air dari daerah lain yaitu sumber air dari kecamatan Tiro/Truseb yang panjang aliran nya mencapai 20km lebih.

Sedangkan pada kategori yang ketiga (3), kecamatan yang mempunyanyi area pertanian yang luas berdasarkan persentase pada luas wilayah. Yang artinya, setengah wilayah di gunakan untuk lahan pertanian. Di urutan pertama ada

Keumala yang 85% wilayahnya digunakan oleh petani. Disusul Indrajaya, Mila, Titue dan Peukan Baro. Letak kelima kecamatan tersebut sangat strategis dengan pengairan air yang berasal dari bendungan keumala. Sumber air melimpah membuat lahan yang begitu luas bisa di manfaatkan oleh para petani. Maka tidak heran jika Keumala, Titue, dan Mila sering memperoleh hasil panen yang stabil di atas rata-rata kecamatan lainnya di Kabupaten Pidie. Selain sumber air yang dekat, pengaruh suhu panas yang lebih rendah juga dapat mempengaruhi hasil dari pertanian di kecamatan tersebut.

4. 2. Perencanaan dan Strategi Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, menjelaskan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan strategis merupakan langkah-langkah yang berisiprogram- program indikatif untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan bahwa tujuan pembangunan akan memberikan nilai tambah bagi *stakeholder* pemerintah daerah. Nilai tambah

diukur berdasarkan parameter objektif yang telah ditentukan. Keberadaan indikator mutlak adanya dalam proses perumusan strategi pembangunan.

Dalam perencanaan pembangunan di kabupaten Pidie terdapat beberapa pertimbangan seperti antara membangun irigasi atau menyediakan bibit unggul untuk para petani. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan anggaran baik dari pemda maupun dari pemprov Aceh. Untuk mengejar target pembangunan di 3 tahun kepemimpinan, kepala daerah dan dinas terkait membuat pagu indikatif dalam perencanaan pembangunan di sektor pertanian. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 berdasarkan program dan kegiatan yang akan di laksanakan dari tahun 2018 s/d 2022, jumlah biaya/dana indikatif yang akan diserap Dinas pertanian dan pangan Kabupaten Pidie sebesar 17 milyar²⁰,-. Akan tetapi pengalokasian anggaran buka hanya untuk sektor pertanian (padi) saja, perkebunan dan juga menjadi fokus dari pemda Pidie.

Sehingga perencanaan juga harus di sesuai dengan ketersediaan anggaran. Hemat penulis, karena ini penelitian hanya melihat pada periode yang terbatas yakni dari tahun 2017-2020 maka penulis membatasi *display*/gambaran data untuk menginkonsistensi penulisan. Lebih jelasnya rincian program pembangunan daerah di tabel bawah ini;

No	Program	Capaian kerja dan Kerangka Pendanaan					
		2018		2019		2020	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp

²⁰ Sumber dari : Rencana Strategis “DISTANBAN PIDIE” 2017-2022.

1	Program peningkatan kesejahteraan Petani	5%	835.000.000.	7%	2.503.000.000	10%	3.020.000.000
2	Program peningkatan Produksi Teknologi Pertanian	12 bln	8.651.689.264	12Bln	9.516.858.190	12Bln	10.468.544.009
3	Program peningkatan produksi pertanian	300Ha	3.780.000.000	350Ha	3.660.000.000	300Ha	2.992.000.000

Gambar 4 Plafon Pendanaan

No	Program	Capaian kerja dan Kerangka Pendanaan					
		2018		2019		2020	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	Program peningkatan kesejahteraan Petani	5%	835.000.000.	7%	2.503.000.000	10%	3.020.000.000
2	Program peningkatan Produksi Teknologi Pertanian	12 bln	8.651.689.264	12Bln	9.516.858.190	12Bln	10.468.544.009
3	Program peningkatan produksi pertanian	300Ha	3.780.000.000	350Ha	3.660.000.000	300Ha	2.992.000.000

Sumber di olah dari Data BPS Aceh dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Pidie

No	Program	Capaian kerja dan Kerangka Pendanaan					
		2018		2019		2020	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	Program peningkatan kesejahteraan Petani	5%	835.000.000.	7%	2.503.000.000	10%	3.020.000.000
2	Program peningkatan Produksi Teknologi Pertanian	12 bln	8.651.689.264	12Bln	9.516.858.190	12Bln	10.468.544.009
3	Program peningkatan produksi pertanian	300Ha	3.780.000.000	350Ha	3.660.000.000	300Ha	2.992.000.000

Menurut Thomas R. Drey, perencanaan untuk pengambilan kebijakan pada sektor pertanian tersebut tentunya diambil oleh *policy Stakeholders* yakni dari Kepala Daerah. Tentunya perencanaan ini sangat di pengaruhi oleh *Public Enviroments*, hal ini bisa di artikan bahwa lembaga-lembaga atau organisasi kepemudaan (OKP) untuk memberi dorongan kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan perencanaan agar tercapainya pembangunan di sektor pertanian.

Jika melihat lebih dalam lagi, maka perencanaan harus dilakukan dengan memperhatikan proseduran, pelaksanaan , dan pengawasan. Andrew Dunsire, dalam tahapan perencanaan perlu diperhatikan tentang adanya kegagalan atau ketidakefektifan dalam pelaksanaan. Bahwa setiap perencanaan yang telah tersusun rapi tidak semuanya terlaksanakan dengan sempurna, terkadang apa yang telah di rencanakan oleh pemerintah daerah akan lain dengan yang di kerjakan.

Melihat kebijakan yang telah direncanakan untuk 5(lima) tahun kedepan berbagai prospek kerja. Maka penulis mewawancara langsung dengan aktor dari pembuat kebijakan tersebut. Maksud dan tujuan ingin mengetahui secara langsung apakah ada program prioritas dari pimpinan daerah kabupaten Pidie, sebagai berikut ;

“Melihat topografi dan wilayah pastinya kita memiliki program prioritas salah satunya di sektor pertanian, karena kenapa harus sektor pertanian. Pertama, karena memang sebagian besar mayoritas masyarakat Pidie adalah petani mata pencariannya adalah dari sektor pertanian. Kedua, kultur masyarakat Pidie umumnya agraris. Kemudian Bentang alam yang begitu luas di Kabupaten Pidie dan kalau kita lihat datanya lebih kurang 30000 hektare areal sawah dan puluhan ribu area perkebunan dan juga kita memiliki 42 km garis kelautan. Program

pertanian dan perkebunan juga harus ditopang oleh sektor kelautan perikanan. Dalam keadaan seperti ini maka program pertanian harus menjadi prioritas di Kabupaten Pidie. Karena disitulah perekonomian masyarakat Pidie ditopang.²¹”

Kemudian hasil wawancara juga dengan pelaksana kebijakan, yaitu SKPD atau Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pidie, Sebagai berikut;

“Kalau kita kalau kita melihat komoditi yang ada di Kabupaten Pidie tentu kita memprioritaskan sektor pertanian di bidang tanaman pangan dikarenakan produktivitas gabah di Aceh secara daerah Pidie menjadi Lumbung padi terbesar ketiga. Disamping itu program prioritas tanaman pangan baik jangka menengah atau jangka panjang padi akan selalu menjadi prioritas program dinas pertanian kabupaten Pidie. Hal ini menyangkut dengan kebijakan dari kementerian baik itu di sektor penguatan pangan Swasembada pangan, dan kita akan terus meningkatkan program program lainnya juga²².”

Di samping itu, pemerintah setelah membuat kebijakan untuk pembangunan sektor pertanian di kabupaten Pidie. Berdasarkan aturan dalam pemerintahan, Pemerintah diwajibkan untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Artinya, dengan harapan program yang telah di susun secara terukur bisa di laksanakan dengan sempurna seiring komunikasi antara *Stakeholders* dari tingkat daerah sampai tingkat Kepala Desa atau *Top – Down System*.

Akan tetapi, hasil wawancara penulis dengan masyarakat di kecamatan Tiro sangat jauh dari yang di harapkan. Komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa tidak terjalin dengan baik menegnai rencana pembangunan atau peningkatan di sektor pertanian. Hal ini penulis dapat dari hasil wawancara dari kepala Desa Pulo Mesjid, Kecamatan Tiro/Truseb, Kab.Pidie, sebagai berikut;

²¹Hasil Wawancara dengan Bapak Fadhullah Tm Daud (Wakil Bupati Pidie), 21 Desember 2021

²²Hasil Wawancara dengan Bapak Plt Dinas Pertanian Kabupaten Pidie, Pada tanggal 22 Desember 2020

“ Pemerintah Kabupaten baik itu Dinas Pertanian atau Penyuluh sangat jarang mensosialisasikan tentang program-program pemerintah di sektor pertanian. Hal ini di buktikan, tidak ada forum baik itu FGD atau diskusi tingkat kecamatan tidak ada sama sekali dalam tahun 2020. Selama saya menjabat Kepala desa dari Tahun 2018-sekarang, hanya ada 2 kali di tahun 2018 dan 2019 dari penyuluh untuk diskusi peningkatan produksi pertanian. Kalau mengenai kebijakan lainnya seperti hal nya di RPMJD, kami tidak mendapat informasi apapun. Ini juga saya tanyakan kepada teman-teman dari kecamatan lain saat ada pertemuan kepala di desa di tingkat kabupaten. Misalnya kecamatan Muara Tiga, Tangse, Mutiara timur, Mutiara barat mereka juga tidak mendapat sosialisasi apapun mengenai kebijakan untuk mencapai pembangunan di sektor pertanian²³. “

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022 melalui Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, perlu ditetapkan strategi untuk merumuskan kebijakan pembangunan tahunan atau tahapan pembangunan pertahunnya yang akan dilaksanakan selama lima (5) tahun ke depan, sebagaimana pada tabel di bawah ini;

Table 3 Visi, Misi, Tujuan , Sasaran dan Strategi Kabupaten Pidie Mengenai Pertanian

Visi : "Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pidie yang Mulia, Berkualitas, Sejahtera, dan Memiliki Masa Depan"		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi : "Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan"		
Meningkatkan mutu, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah usaha untuk pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan Pidie dan Meugoe Troe	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian,	Mengembangkan sektor Pertanian sesuai potensi kewilayahan serta peningkatan kualitas produksi

²³Hasil Wawancara Dengan Bapak Bakhtiar Ali selaku Kepala Desa Pulo Mesjid, pada tanggal 23 Desember 2021

		Meningkatkan Produktivitas dan daya saing produk pertanian
	Menurunnya angka Inflasi di Kabupaten	Memastikan Ketersediaan barang dan stabilitas harga
Meningkatkan Pendapatan Pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan <i>Pidie Troe</i> dan <i>Meugoe</i>	Meningkatkan pendapatan petani	Mendorong pengembangan dan industri pengolahan dalam rangka memberi nilai tambah hasil produk lokal
		Pembangunan dan pembukaan akses pasar untuk mendistribusikan produk
Mengurangi kerawanan pangan dalam rangka mewujudkan <i>Pidie Troe</i> dan <i>Meugoe</i>	Meningkatkan Ketahanan pangan	Menjamin ketersediaan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga pangan
		Meningkatkan kualitas produk pangan segar dan mengembangkan olahan produk tanaman pangan

Sumber di olah dari : Dinas Pertanian Kabupaten Pidie

4.3 Implementasi Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Pidie 2017-2020

Pertanian merupakan sektor yang sangat berperan penting bagi komoditas bahan makanan, terutama padi karena Kabupaten Pidie merupakan kawasan basis tanaman padi pada umumnya dan juga menjadi mata pencaharian bagi mayoritas masyarakat.

Pertanian tidak bisa di pandang sebagai pekerjaan sampingan, melainkan menjadi petani harus di lihat sebagai kebutuhan dalam penggerak ekonomi daerah maupun nasional. Karena terbukti 80% pendapatan PDB nasional di sumbangkan oleh hasil pertanian²⁴. Sehingga kemajuan pertanian diharapkan bisa bertambah maju seiring majunya perkembangan zaman yang sudah modern ini.

Oleh karena itu Pemerintah Pidie telah sampai pada tahap pelaksanaan dari perencanaan yang telah di rancang dengan fokus pada sektor pertanian. Pelaksanaan pada tahun 2017 yang berhasil di capai oleh pemerintah Pidie yaitu pembangunan pada sektor pembangunan fisik yakni irigasi. Berdasarkan Pagu indikatif, ada tiga poin yang menjadi acuan dari Pemda dalam program pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pidie. Pertama, meningkatkan kesejahteraan petani. Kedua, pembangunan teknologi pembangunan. Ketiga, meningkatkan produksi pertanian. Hal tersebut terlihat jelas pada tabel di bawah ini;

No	Program	Capaian
1	Meningkatkan Produksi Pertanian	Belum tercapainya peningkatan produksi padi, jumlah produksi dari 285 Ribu Ton tahun 2017 menjadi 269Ribu Ton pada tahun 2020. Terjadi penurunan jumlah produksi hingga 5,6% atau 16Ribu Ton ²⁵

²⁴ Prabowo Subianto , *Paradoks Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2011), hal. 160.

²⁵ Sumber dari ; *BPS Aceh dan BPS Kabupaten Pidie 2017-2020*

2	Menurunkan Angka Inflasi	Berdasarkan hasil penelitian, tidak di temukan angka inflasi di Kabupaten Pidie. Di Provinsi Aceh, hanya terdapat 4 (empat) kota besar yang menunjukan adanya inflasi antara lain; Kota Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe dan Langsa.
3	Meningkatkan Pendapatan Petani	Peningkatan pendapatan petani dapat di lihat dari indeks NTP (nilai tukar petani). Adapun NTP pada tahun 2017 sebesar NTP=108,27 sedangkan pada tahun 2020 sebesar NTP=106. Terjadinya penurunan yang signifikan sebesar 2,09% atau 2,27 poin ²⁶ . Sedangkan peningkatan pembangunan industri, jumlah pengolahan padi pada tahun 2020 bertambah 4 penggilingan besar dan 6 penggilingan kecil dari tahun sebelumnya 121 penggilingan besar dan 174 penggilingan kecil pada tahun 2017 ²⁷ .
4	Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga	Meskipun produktivitas padi menurun pada tahun 2020, akan tetapi tingkat ketersediaan pangan dalam hal ini konsumsi beras masih

²⁶ Sumber dari ; BPS Aceh dan BPS Kabupaten Pidie 2017-2020

²⁷ Sumber dari ; BPS Aceh dan BPS Kabupaten Pidie 2017-2020

		terjaga yakni sebesar 7Ribu Ton beras pada tahun 2017 dan 6Ribu Ton pada tahun 2020. Sedangkan untuk menjaga harga gabah di Kabupaten Pidie masih berkisar Rp4500/kg - Rp5000/kg, dan disamping itu harga beras berkisar Rp15000/kg – Rp19000/kg sepanjang tahun 2017-2020 ²⁸ .
--	--	--

Sedangkan program kerja (Renja) 2017-2020, data pendukung anggaran pembiayaan pembangunan pada sektor pertanian di Kabupaten Pidie terlihat jelas pada tabel di bawah ini ;

Table 4 Realisasi Pendanaan Pembangunan 2017-2018

No	Belanja	Jumlah Dana	Nilai Kontrak	Realisasi		Sisa Anggaran
				Keuangan	Presentase	
1	Pembangunan Irigasi Air/Tanah Bor	787.524.000	779.464.000	665.189.000	84.47	122.335.000
2	Pembangunan Embung	289.375.000	286.645.000	157.450.000	54.41	131.925.000
3	Perbaikan embung	1.270.500.000	1.165.937.000	165.937.000	91.77	104.563.000
4	Pembangunan Dam Parit	1.806.525.000	1.724.394.000	545.506.200	85.55	261.018.000
5	Pembangunan Pintu Air	484.100.000	480.958.000	182.951.000	34.34	301.149.000
Jumlah		4.638.024.000	4.437.398.000	3.717.033.200	80.14	920.990.800

Sumber di Olah dari BPS Aceh dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Pidie

Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 ada perbedaan pada tahun sebelumnya, yakni program yang jalankan bersifat kontinuitas atau melanjutkan program sebelumnya yang sedang berjalan. Hal ini di sebabkan oleh keterbatasan anggaran sebagaimana yang di sampaikan oleh wakil bupati;

²⁸ Sumber dari ; BPS Aceh dan BPS Kabupaten Pidie 2017-2020

“Jadi seperti ini Kabupaten Pidie sama dengan seperti kabupaten lainnya di Aceh, yang pertama ruang fiskal kita sangat kecil kenapa kecil karena selama ini kita menggunakan dana transfer baik itu transfer dari pusat dalam bentuk DAU dan DAK dan juga transfer dari provinsi atau daerah dalam bentuk otonomi khusus Aceh atau DOKA.

Kalau DAU sudah banyak tersedot ke dalam kebutuhan kebutuhan rutin pemerintahan seperti seperti dana desa. Mungkin ada ruang di situ tapi sangat kecil dan itu memang kita distribusikan ke bidang pertanian sama halnya dengan DOKA, dan juga sama halnya DAK yang selalu ada kita selalu mengupayakan untuk alokasi dana sebisa mungkin ke dalam sektor pertanian kemudian selebihnya ada PAD sebagaimana kita ketahui bahwa PAD di Kabupaten pidie sangatlah kecil.

Kalau ditanya alokasi dana untuk sektor pertanian selama ini ada dan kalau ditanya berapa saya hanya bisa menjawab ada tapi tidak besar karena ruang fiskal kita yang sangat kecil tidak mungkin kita menganggarkan anggaran yang besar kepada sektor pertanian. Selain itu program program reguler dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat membantu di sektor pertanian. Contohnya seperti pembangunan irigasi pemberian bibit dan berupa bantuan lainnya yang langsung diserahkan kepada masyarakat. Disamping itu umpamanya seperti pembangunan Waduk yang menjadi program nasional seperti waduk Keumala dan waduk di Tiro²⁹.

Melihat keterbatasan anggaran yang di miliki oleh pemerintah daerah dalam mencapai pembangunan di sektor pertanian, peneliti juga melakukan konfirmasi kepada pihak pelaksana yaitu Plt Dinas Pertanian Pidie;

“Kalau kita Tinjau dari aspek pendanaan, kita mendanai program itu bukan hanya dengan APBK. Kalau berkacamata dengan dana tersebut maka itu tidak akan cukup mendanai pertanian. Maka hari ini kita berbenah diri, ini terbukti dari pemerintah Aceh sejauh tahun 2021 pemerintah Aceh mengalokasikan 17milyar untuk sektor pertanian tanaman pangan.

Kita juga terus melakukan pendekatan-pendekatan secara emosional dengan pemerintahan Aceh agar nantinya APBA terus mengalir ke Kabupaten Pidie untuk mendanai program pertanian”.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Fadhlullah Tm Daud (Wakil Bupati Pidie), 21 Desember 2021

Sedangkan pembangunan yang di lakukan pada tahun 2019, pemerintah berfokus pada 3(tiga) subjek sesuai dengan pagu indikatif renstra. Belanja anggaran yang di serap melebihi dari anggaran yang tersedia. Sehingga program 2020 lanjutan dari pembangunan tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan konfirmasi baik dari Wakil Bupati dan Plt Dinas pertanian Pidie. Maka belanja pada tahun 2019-2020 menghabiskan biaya sebesar 17 Milyar³⁰.

Politik selalu di perkuat oleh ekonomi yaitu uang atau anggaran. Proses semacam ini tidak bisa terlepas dari serangkaian proses politik, perencanaan dan implementasi tanpa anggaran itu akan menjadi hampa. Sehingga *David Easton* mengemukakan bahwa pentingnya pendekatan dalam sistem yang di politik baik itu antara hubungan kepala daerah tingkat II dengan kepala daerah tingkat I, sebagaimana pembagian kekuasaan (*Trias Politica*) menurut *Montesquieu*.

Kegiatan tersebut, memang sudah dilakukan secara adat di kabupaten pidie. Maka tidak heran di kabupaten Pidie adanya istilah *Khanduri Blang*, kegiatan ini begitu melekat yang tidak di pisahkan dari petani. Maka dari itu pemerintah daerah mengalokasi anggaran untuk kegiatan seperti ini, dengan harapan terorganisirnya masa tanam padi di Kabupaten Pidie.

Sedangkan pada program penerapan teknologi, pemerintah berfokus pada pengadaan alat dan mesin pertanian. Seperti *Harvester Combine* atau mesin pemotong padi, traktor, dan alat pompa air. Kebutuhan petani, jikalau dari dari segi teknologi memang benar adanya harapan dari masyarakat dalam proses panen membutuhkan alat seperti mesin pemotong padi. Karena saat musim panen

³⁰ Sumber : Renja Kabupaten Pidie 2017-2022

raya di Pidie khususnya, sering terjadi ketiadaan alat tersebut. Di karenakan harvester combine banyak di miliki oleh pihak swasta atau perorangan. Hal ini dapat memicu keterlambatan panen dan mengakibatkan kualitas dari gabah menurun. Maka dalam hal ini pemerintah sangat tepat dalam mengadakan program tersebut.

Kemudian, program yang ketiga ialah berfokus pada peningkatan produksi pertanian. Produktivitas dari padi akan berbanding lurus dengan fasilitas yang di miliki oleh petani. Semakin modern penanaman maka semakin baik hasil yang di hasilkan. Hal mutlak untuk bisa meningkatkan produktivitas adalah dengan menyediakan bibit yang unggul.

Oleh karena itu tabel di bawah akan menyajikan alokasi anggaran dalam 2 tahun yakni dari 2019-2020.

Table 5 Alokasi Anggaran Pertanian 2019 dan 2020

No	Belanja	Jumlah Dana	Nilai Kontrak	Realisasi		Sisa Anggaran
				Keuangan	Presentase	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2,221,700,182	2,221,016,940	683,242	100%	683,241.00
2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	6,264,346,003	6,263,900,000	446,003	100%	446,002.00
3	Program peningkatan Produksi Pertanian	9,248,041,300	9,247,390,000	651,300	100%	651,299.00
Jumlah		17,734,087,485	17,732,306,940	1,780,545		1,780,542.00

Sumber di Olah dari BPS Aceh dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Pidie

Jika mengukur sejauh mana pembangunan yang telah di realisasikan oleh pemerintah kabupaten pidie maka kita dapat melihat di bawah ini;

Hasil wawancara dengan Wakil Bupati Pidie bahwa produksi padi di Kabupaten Pidie selalu surplus plus. Maka dari itu, keberhasilan petani apakah bisa membuat mereka keluar dari zona kemiskinan untuk mencapai taraf hidup yang ideal atau bisa kah membuat petani bisa sejahtera. Berikut hasil wawancara dengan Wakil Bupati Pidie :

“Masih belum buktinya para petani kita masih bermasalah dengan harga biaya kalau kita hitung biaya produksi dan laba yang didapat oleh petani masih sangat sangat di bawah standar pencapaian kesejahteraan petani³¹i.

Berdasarkan wawancara dengan Plt Dinas Pertanian tampak bahwa petani belum dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Hal ini terlihat jelas dari capaian pembangunan sektor pertanian padi di Kabupaten Pidie belum meningkat, sebagaimana di jelaskan oleh Plt Dinas Pertanian Kabupaten Pidie;

“Mengukur dan menjabarkan kesejahteraan petani ini banyak variabel yang harus dilihat. Kalau meningkatnya produksi petani ini belum tentu membuat sejahtera bagi petani. Karena di pertanian ini variabel nya produksi meningkat tapi belum berhasil bila pemasaran hasilnya masih bergantung provinsi lain. Mengukur tingkat produksi petani tanpa jaminan pasar maka pendapatan petani tidak otomatis meningkat, maka sangat di perlukan sentuhan sektor swasta. Pemerintah perlu membuat suatu swastanisasi industri pertanian seperti halnya di daerah daerah lainnya. Produksi petani akan ditampung oleh para pengusaha untuk petani tidak menjual nya lagi keluar daerah³²”.

Disamping itu hasil wawancara dengan beberapa petani yang mengaku belum menikmati kesejahteraan hasil dari pertanian padinya,

³¹Hasil Wawancara dengan Bapak Fadhullullah Tm Daud (Wakil Bupati Pidie), 21 Desember 2021

³²Hasil Wawancara dengan Bapak Plt Dinas Pertanian Kabupaten Pidie, Pada tanggal 22 Desember 2020

petani menjelaskan hal tersebut disebabkan karena distribusi bahan-bahan pendukung pertanian seperti pupuk, pestisida yang belum merata dan harga gabah yang belum terjamin, sebagaimana yang disampaikan oleh petani;

“Di umur saya yang sudah 24 tahun, yang sudah mengeluti pekerjaan di bidang pertanian, rasanya seperti mencelupkan debu kedalam air. Artinya, begitu sampai pada hari panen maka di situlah harga gabah akan turun³³”.

4.4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Pembangunan di Sektor Pertanian

1. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung dalam meningkatkan pembangunan sektor pertanian di kabupaten Pidie sangat berpengaruh dalam menyelesaikan sebuah program, maka wakil Bupati menjabarkan seperti berikut;

“Sebuah sebuah program yang menjadi pendukung adalah faktor komunikasi. Kalau kita bangun komunikasi nya dari atas sampai ke tingkat petani lancar bagus alhamdulillah program program pertanian akan menjadi berhasil dilaksanakan. Kalau kita melihat di daerah daerah pertanian yang sukses seringkali kita mendapatkan spirit dari petani itu sendiri bahwa mereka yakin dan mau berusaha untuk untuk mencapai atau meningkatkan petani yang lebih produktif lebih unggul dan lebih sukses. Selain itu hal yang mendukung program program pertanian di Kabupaten Pidie seperti Gotongroyong masyarakat ketika melihat saluran saluran irigasi yang tersumbat mereka tidak menunggu tidak menunggu pemerintah untuk memperbaiki nya tapi dengan Inisiatif sendiri saling membantu inilah yang salah satu indikator kenapa program kita berhasil dilaksanakan.³⁴”.

Kemudian Plt Dinas Pertanian memberikan penjelasan sebagai berikut;

³³Hasil Wawancara dengan Agun Gunawan selaku Petani dari desa Lhok Igeuh, Tiro

³⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Fadhlullah Tm Daud (Wakil Bupati Pidie), 21 Desember 2021

“Letak kabupaten pidie yang strategis menguntungkan bagi kita, dengan hal ini maka apa saja yang di produksi akan lebih cepat tersampaikan ke kabupaten lain nya. Terlebih lagi masyarakat di pidie lebih banyak di daerah lainnya maka ini satu hal bagus bagi kita”³⁵”

Di samping itu, beberapa hal yang bisa menjadi pendukung dalam implementasi ialah dengan melihat proses pesan yang di sampaikan. Hal ini Sering kali tidak terlaksanakan dengan maksimal. Masalah dalam menerima pesan, komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan, dengan kata lain jika komunikan tidak mengerti pesan yang diterimanya maka komunikasi tidak terjadi.

Persoalan pada menafsirkan pesan, melalui proses komunikasi, perilaku serta perasaan seseorang atau sekelompok orang bisa dipahami oleh pihak lain. akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif bila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan atau bisa dimengerti oleh penerima pesan tadi

2. Faktor penghambat

Selain adanya faktor pendukung, pembangunan sektor pertanian kabupaten Pidie juga mengalami sedikit banyaknya masalah yang menghambat lajunya pembangunan pertanian di kabupaten pidie. Seperti yang di jelaskan oleh Wakil Bupati Pidie ;

“Kemudian yang menjadi faktor penghambat seperti halnya konflik antar desa konflik antar kecamatan dalam hal pembagian air. Hal inii masih seringkali terjadi diberbagai tempat di

³⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Plt Dinas Pertanian Kabupaten Pidie, Pada tanggal 22 Desember 2020

berbagai desa Gampong ditingkat kecamatan di Kabupaten Pidie³⁶.”

Kemudian dari pada itu, tidak andilnya masyarakat dalam di saat proses implementasi kebijakan akan timbul masalah dan cenderung mengakibatkan kegagalan dari kebijakan itu sendiri. Partisipasi masyarakat di perlukan guna untuk dalam membantu pemerintah.

Di sektor pertanian kabupaten Pidie, seringkali menghadapi permasalahan bagi petani di lereng pengunungan. Seperti yang di jelaskan oleh Plt Dinas Pertanian Kabupaten Pidie.

“Hambat yang seringkali terjadi di Kabupaten Pidie adalah gangguan dari satwa liar, ini keluhan yang sering disampaikan baik dari Penyuluh atau masyarakat sendiri ke kantor dinas. Hal ini sangat menghantui para petani baik petani padi maupun petani perkebunan³⁷”.

³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Fadhullah Tm Daud (Wakil Bupati Pidie), 21 Desember 2021

³⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Plt Dinas Pertanian Kabupaten Pidie, Pada tanggal 22 Desember 2020

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Pidie membuat perencanaan program dan strategis untuk pembangunan pada sektor pertanian antara lain yaitu;

- a) Meningkatkan produktivitas sektor pertanian
- b) Menurunkan angka infasi di Kabupaten Pidie
- c) Meningkatkan pendapatan petani
- d) Meningkatkan ketahanan pangan

Adapun strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie dalam implementasi program di atas adalah;

- a) Peningkatan kualitas produksi
- b) Memastikan ketersediaan barang dan stabilitas harga
- c) Mendorong pengembangan dan industri pengelolaan
- d) Menjamin ketersediaan pangan daerah dan menjaga harga stabilitas pangan

2. Adapun capaian program pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pidie sebagai berikut;

- a) Dalam hal produktivitas, jumlah produksi padi di Kabupaten Pidie menurun pada tahun 2020 sebanyak 16ribu Ton dengan jumlah produksi sebesar 269Ribu Ton pada tahun 2020. Produksi menurun

jika dibandingkan jumlah produksi pada tahun 2017 sebanyak 285Ribu Ton.

- b) Dari sisi inflasi, Kabupaten Pidie tidak tergolong kedalam kabupaten yang terkena inflasi. Pernyataan ini disampaikan oleh BPS Provinsi Aceh.
- c) Peningkatan pendapatan petani dapat di lihat dari indeks NTP (nilai tukar petani). Adapun NTP pada tahun 2017 sebesar NTP=108,27 sedangkan pada tahun 2020 sebesar NTP=106. Terjadinya penurunan yang signifikan sebesar 2,09% atau 2,27 poin³⁸. Sedangkan peningkatan pembangunan industri, jumlah pengolahan padi pada tahun 2020 bertambah 4 penggilingan besar dan 6 penggilingan kecil dari tahun sebelumnya 121 penggilingan besar dan 174 penggilingan kecil pada tahun 2017³⁹.
- d) Meskipun produktivitas padi menurun pada tahun 2020, akan tetapi tingkat ketersediaan pangan dalam hal ini konsumsi beras masih terjaga yakni sebesar 7Ribu Ton beras pada tahun 2017 dan 6Ribu Ton pada tahun 2020. Sedangkan untuk menjaga harga gabah di Kabupaten Pidie masih berkisar Rp4500/kg -Rp5000/kg, dan disamping itu harga beras berkisar Rp15000/kg – Rp19000/kg sepanjang tahun 2017-2020⁴⁰.

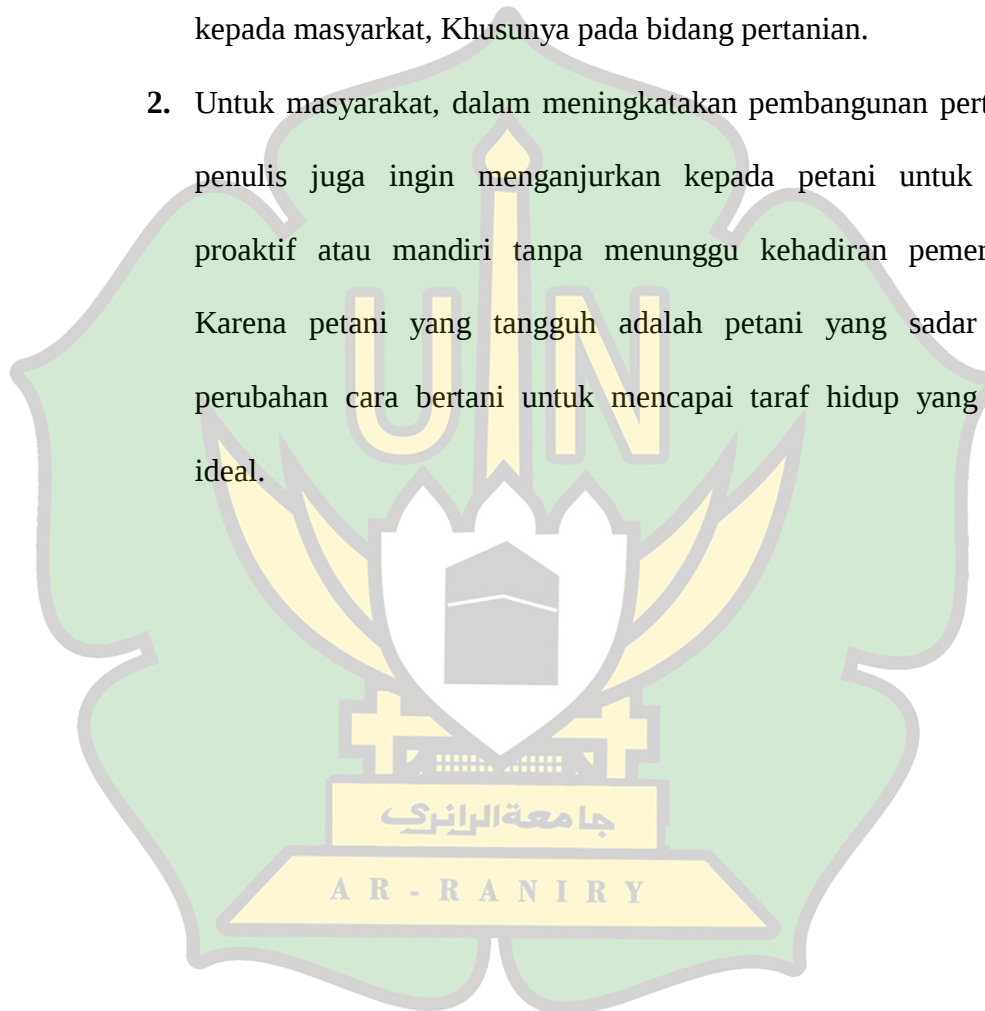
³⁸ Sumber dari ; BPS Aceh dan BPS Kabupaten Pidie 2017-2020

³⁹ Sumber dari ; BPS Aceh dan BPS Kabupaten Pidie 2017-2020

⁴⁰ Sumber dari ; BPS Aceh dan BPS Kabupaten Pidie 2017-2020

5.2 Saran

1. Untuk pemerintah, dalam hal kebijakan seharusnya ada sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat melalui penyuluh kebijakan. Agar kebijakan yang telah di rencanakan tersampaikan kepada masyarakat, Khususnya pada bidang pertanian.
2. Untuk masyarakat, dalam meningkatkan pembangunan pertanian penulis juga ingin menganjurkan kepada petani untuk lebih proaktif atau mandiri tanpa menunggu kehadiran pemerintah. Karena petani yang tangguh adalah petani yang sadar akan perubahan cara bertani untuk mencapai taraf hidup yang lebih ideal.





DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). Statistik Indonesia. Jakarta. BPS.
- Susilowati SH, Purwantini TB, Hidayat D, Maulana M, Ar-Rozi AM, Yofa RD, Supriyati, Sejati WK. 2012. Panel petani nasional (Patanas): Dinamika Indikator pembangunan pertanian dan perdesaan. Laporan Akhir Penelitian. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Syakir M. 2016. Pemantapan inovasi dan diseminasi teknologi dalam memberdayakan petani. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta [Internet]. [diunduh 2018 Feb 5]. Tersedia dari: [http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/prosid ing_2016/0_1.pdf](http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/prosid%20ing_2016/0_1.pdf)
- Basri, Faisal H. 2005. Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah. Universitas Brawijaya, Malang. [http://128.8.56.108/irisdata/PEG/Bahasa/malang/Malang tantangan. pdf.](http://128.8.56.108/irisdata/PEG/Bahasa/malang/Malang%20tantangan.pdf), 22 Maret 2005).
- Suradisastra, K. 2011. Revitalisasi Kelembagaan untuk Mempercepat Pembangunan Sektor Pertanian dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian 4(2), 2011: 118-136
- Jamal, H, 2008. Mengubah Orientasi Penyuluhan Pertanian. Balitbangda Provinsi Jambi. Jambi Ekspres Online. Diakses tanggal 18 Februari 2008.
- Krisnamurthi B. (2014). Kebijakan untuk Petani: Pemberdayaan untuk Pertumbuhan dan Pertumbuhan yang Memberdayakan. Disampaikan pada Pembukaan Konferensi Nasional XVII dan Kongres Nasional XVI Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Bogor (ID).
- Purwanto; Mat Syukur; dan Pudji Santoso, 2007. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Di Jawa Timur. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Malang. Jawa Timur.
- Arifin, Bustanul. 2004a. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.
- Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini. 2001. Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Suryana, Ahmad. 2003 Bantuan Pangan dalam Konteks Ketahanan Pangan. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian.

Tim INDEF. 2005. Prospek Ekonomi dan Bisnis 2005: Ilusi Stabilitas Ekonomi Makro”. Jakarta: Pustaka Indef.

Simatupang, Pantjar. 1997. “Industrialisasi Pertanian sebagai Strategi Agribisnis dan Pembangunan Pertanian dalam Era Globalisasi” dalam Sudaryanto et al. “Industrialisasi, Rekayasa Sosial, dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian. Pp: 15-25.

Saptana, T; Pranadji; Syahyuti dan Roosganda, E.M., 2003. Transformasi Kelembagaan untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan. Laporan Penelitian. PSE. Bogor.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dengan Narasumber

LAMPIRAN 1



Foto wawancara dengan narasumber bapak Fadhlullah T.M Daud (Wakil Bupati Kabupaten Pidie)



Foto wawancara dengan bapak Abdullah (Plt. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pidie)



Foto wawancara dengan bapak fajri, salah satu petani Desa Pulo Mesjid, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie.



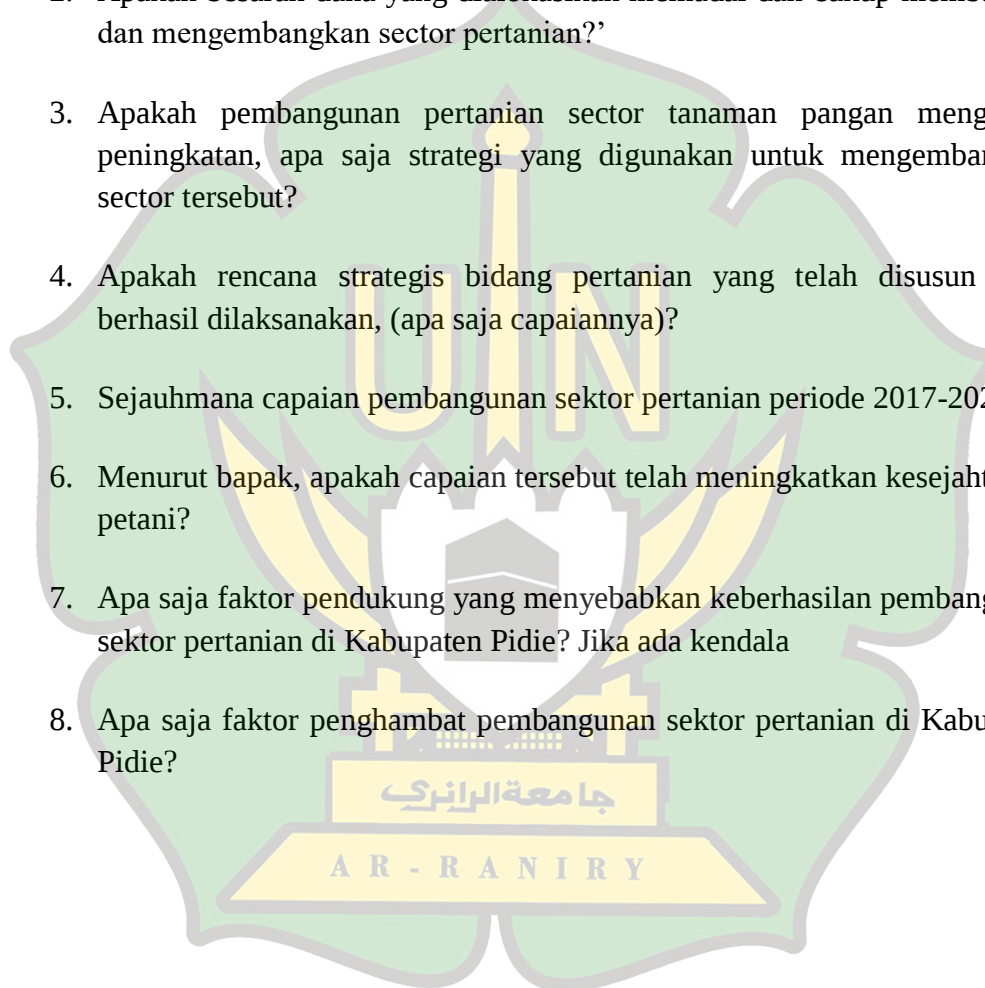
Foto wawancara dengan bapak Bakhtiar Ali (Kepala Desa Pulo Mesjid, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie) juga berprofesi sebagai petani.



Foto wawancara dengan bapak Agun sebagai petani muda di Desa Lhok Igeuh, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie.

Lampiran 2

1. Apakah PembKab Pidie memiliki prioritas dan kebijakan tertentu terkait pembangunan sector pertanian selama periode kepemimpinan Bapak Bupati/Wakil Bupati?
2. Apakah besaran dana yang dialokasikan memadai dan cukup membangun dan mengembangkan sector pertanian?'
3. Apakah pembangunan pertanian sector tanaman pangan mengalami peningkatan, apa saja strategi yang digunakan untuk mengembangkan sector tersebut?
4. Apakah rencana strategis bidang pertanian yang telah disusun telah berhasil dilaksanakan, (apa saja capaiannya)?
5. Sejauhmana capaian pembangunan sektor pertanian periode 2017-2020?
6. Menurut bapak, apakah capaian tersebut telah meningkatkan kesejahteraan petani?
7. Apa saja faktor pendukung yang menyebabkan keberhasilan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pidie? Jika ada kendala
8. Apa saja faktor penghambat pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pidie?



Lampiran 3 SK Skripsi

Lampiran 3

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2374/Un.08/FISIP/Kp.07.6/10/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 23 September 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Muhammad Thalal, Lc., MA Sebagai pembimbing pertama
2. Renaldi Satriansyah, S.E., M.HSc. Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :
Nama : Ikhwani Rijal
NIM : 170801047
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Analisis Rencana Strategi Dan Pembangunan Kabupaten Pidie Pada Sektor Pertanian 2017-2020

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 Oktober 2021
An. Rektor
Dekan,

Ermita Dewi

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimonitori dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner